

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM
KARTEL DALAM UNDANG - UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**



Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

FAROID MUFTI

NPM : 1421030364

Program Studi : Muamalah

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
2018**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
SISTEM KARTEL DALAM UNDANG - UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN
PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
(S.H)



Pembimbing I : Hj. Nurnazli., S.H., S.Ag., M.Ag.
Pembimbing II : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG**

2018

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KARTEL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Oleh :
Faroid Mufti

Kartel merupakan perjanjian oleh para pelaku usaha yang membuat perjanjian dengan pelaku usaha saingannya yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Penelitian ini mengangkat rumusan masalah yaitu : 1) Bagaimana sistem kartel dalam perdagangan menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ? 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sistem kartel dalam perdagangan ?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui Bagaimana sistem kartel dalam perdagangan menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. 2) Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap sistem kartel dalam perdagangan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian adalah penelitian pustaka (*library research*), penelitian ini

bersifat deskriptik-analitik, dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

Berdasarkan hasil analisis tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwa: 1) Kartel dalam perdagangan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha sainganya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 2) Dalam perspektif hukum Islam kartel merupakan suatu praktek usaha yang bertentangan dengan fiqih muamalah, dimana dalam hal ini kartel merupakan salah satu bentuk perjanjian atau perserikatan antar pelaku usaha dalam rangka memperoleh market power dengan mengatur harga produk tertentu dengan cara membatasi ketersediaan barang di pasar yang bertujuan untuk mendistorsi pasar sehingga dapat mengakibatkan persaingan tidak sempurna.



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung, Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Setelah Tim Pembimbing mengoreksi dan memberikan masukan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama : **Faroid Mufti**
NPM : **1421030364**
Fakultas : **Syari'ah**
Jurusan : **Mu'amalah**
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
SISTEM KARTEL DALAM UNDANG-
UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTEK
MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Mei 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.
NIP.197111061998032005

Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I
NIP. 196901051998031003

Mengetahui,
Ketua Prodi Muamalah

Dr. H. A. Kurnedi Ja'far., S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121007



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung, Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM KARTEL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**, disusun oleh Faroid Mufti, NPM. 1421030364, Program Studi Muamalah, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal : Rabu, 16 Mei 2018 di Ruang Sidang II Fakultas Syariah.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Khoiruddin, M.S.I. 

Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I. 

Penguji I : Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum. 

Penguji II : Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag. 



**Mengetahui,
Dean Fakultas Syariah**

r. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP. 197009011997031002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا¹

sesungguhnya Allah berfirman : “Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya.” (HR. Abu Daud)²



¹ Abu dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats *Sunan Abu Dawud*, Indonesia, Maktabah Dahlan jus III Kitab Buyu' bab Syirkah, h. 256.

² Mohammad Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), h. 423.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta dan kasih sayang, serta hormat yang tak terhingga kepada ;

1. Kedua orang tuaku yaitu Bapak Musthollah, S.Pd. dan Ibu Parwati karena berkat kesabaran beliau, cinta dan kasih sayang beliau, dukungan moral, spiritual dan materi, serta senandung do'a yang ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakekku Dalil Budiono, Kakak Farid Arwaji, adik-adikku Rais Abdillah dan Aulia Annisa Fitri yang selalu memberikan senandung do'a yang ikhlas, hiburan, semangat yang luar biasa, serta selalu memberikan pertolongan dengan ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



RIWAYAT HIDUP

Faroid Mufti lahir di Dusun Wonokriyo Pekon Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu pada tanggal 7 November 1996 di Wonokriyo, ia terlahir dari pasangan Bapak Musthollah, S.Pd. dan Ibu Parwati. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara yaitu Farid Arwaji, Rais Abdillah dan Aulia Annisa Fitri.

Riwayat Pendidikan yang ia tempuh di TK Aisyah Dusun Wonokriyo Pekon Wonodadi Kecamatan Gaadingrejo Kabupaten Pringsewu sejak tahun 2000-2002, SDN 6 Wonodadi Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu sejak tahun 2002-2008, SMPN 1 Gadingrejo Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu sejak tahun 2008-2011, MAN PRINGSEWU Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu, sejak tahun 2011-2014, dan langsung melanjutkan pendidikan strata satu di Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah dan mengambil program studi Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah), sejak tahun 2014-2018

Selama menjadi mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung yang kini sudah menjadi UIN Raden Intan Lampung ia aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa PIK Sahabat UIN Raden Intan Lampung dan dipercaya untuk menjadi pendidik sebaya selama 2 tahun berturut-turut. Ia juga aktif dalam organisasi yang ada di kampungnya seperti organisasi kepemudaan yaitu pemuda Garda Wonokriyo dan Kampung Demokrasi Wonodadi, selain itu ia juga aktif dalam kegiatan sosial yang ia dirikan bersama rekan-rekannya yaitu dalam bidang literasi yang diberi nama gerobak pustaka.

Pada tahun 2015 ia menjadi mahasiswa yang berprestasi di kampus IAIN Raden Intan Lampung yaitu dengan terpilih menjadi Duta Mahasiswa GenRe kampus 2015 dan mewakili mahasiswa kampus dalam ajang pemilihan Duta Mahasiswa GenRe Provinsi Lampung Tahun 2015 dan mendapatkan

predikat Runner Up 3 Duta Mahasiswa GenRe Provinsi
Lampung Tahun 2015.



KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Kartel Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Srata Satu (S1) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) dalam bidang ilmu syariah.

Atas bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa dihaturkan terimakasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. Alamsyah, S.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung
3. Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H. Selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Khoiruddin, M.S.I. Selaku sekretaris Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung
4. Hj. Nurnazli, S.H., M.H. dan Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan segenap civitas akademika UIN Raden Intan Lampung

6. Kepala dan Karyawan Pepustakaan Fakultas Syariah dan Institut yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Segenap guruku di TK, SD, SMP, dan MAN yang telah mengajar dengan penuh kasih sayang.
8. Kakak iparku Eni Ro'in yang selalu memberikan hiburan, semangat yang luar biasa, serta selalu memberikan pertolongan dengan ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman spesialku Eva Mariyati yang selalu memberikan hiburan, semangat yang luar biasa, serta selalu memberikan pertolongan dengan ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabatku Imam Prabowo, Imam Wahyu, Rahmatulloh, Novita Sari, Devi Nia Pramesti, Rahma Putri Asih, Ricky Helmi Arif, Yulian Choulis, Endarika Yulianto, Dedi Wahyudi Irawan, Ulfa Syukrillah, Yanda Meilya Anggraeni, Joni Irawan, Ando Friska, Eduwar Wahyu, Nur Azhari, Sulthon, Yuliana, Vivi Mulya Setiyana, Wiwik Setiawati, Isnaini Novi Prihati, Rama Dona Laila, Cici Alqoriyani, Fitriyani Dewi, Revi Liansari atas motivasi dan juga kebersamaanya.
11. Teman-teman seperjuangan Jurusan Muamalah B angkatan 2014
12. Rekan-rekan di UKM Pusat Informasi dan Konseling Sahabat UIN Raden Intan Lampung
13. Rekan-rekan di Forum GenRe Lampung dan Forum GenRe Prigsewu
14. Rekan-rekan di Ikatan Muli Mekhanai Kabupaten Pingsewu
15. Rekan-rekan di Pemuda Garda Wonokriyo, Garda Gowes Club, Garda Akustik, Kampoeng Demokrasi Wonodadi.

Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT, tentunya dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu tidak lain disebabkan karena batasan kemampuan, waktu, dana yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberi masukan dan saran, guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya karya tulis ini (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keIslaman.

Bandar Lampung, Mei 2018

Penulis,





DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN ..	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang	3
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Dan Manfaat	8
F. Metode Penelitian	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Kerjasama (Syirkah) dalam Hukum Islam	13
1. Pengertian Syirkah	13
2. Dasar Hukum Syirkah	14
3. Rukun dan Syarat Syirkah	18
4. Prinsip-Prinsip Muamalah	21
5. Macam-Macam Syirkah	23
6. Berakhirnya Akad Syirkah	35

B. Syirkah Kerjasama Kemitraan.....	36
C. Penetapan Harga Menurut Hukum Islam	37
D. Kaidah Fiqih Yang Berkenaan Dengan Kemudharatan Harus Dihilangkan	39

BAB III KARTEL

A. Tinjauan Umum Tentang Kartel Dalam Perundang- Undangan Di Indonesia	41
1. Pengertian Kartel	41
2. Jenis-Jenis Kartel	53
3. Dampak Sistem Kartel Dalam Perdagangan	56
B. Permasalahan Dalam Kartel	59
1. Rintangan Masuk Perusahaan Kartel.....	59
2. Keberadaan Sindikat Kartel Di Indonesia	60
C. Penerapan Pendekatan <i>Rule of Reason</i> Dan <i>Per Se Illegal</i> dalam UU Persaingan Usaha Tidak Sehat	62

BAB IV ANALISIS

A. Sistem Kartel Dalam Perdagangan Menurut Undang- Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangn Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	67
B. Analisis Hukum Islam Mengenai Sistem Kartel Dalam Perdagangan	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar tidak mengalami disinterpretasi atau salah penafsiran mengenai maksud judul skripsi ini, maka pada bagian penegasan judul akan diuraikan secara rinci. Skripsi ini berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Karel dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musahab, duduk perkaranya, dan sebagainya); penguraian suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan; penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya, proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.¹

Pengertian hukum Islam menurut para ahli diungkapkan oleh hasbi ash-shidieqy yang menyatakan bahwa hukum Islam adalah koleksi usaha para ahli hukum Islam dalam menerapkan syariat atau hukum-hukum yang sesuai dengan kebutuhan manusia.² Hukum Islam menurut guru besar Universitas Indonesia Haliman, ialah nama yang biasa diberikan kepada dasar-dasar dan hukum-hukum yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi

¹Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), h. 45

²Habsy Ash-Shidieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 44

Muhammad yang diwajibkan kepada umat Islam untuk mematuhiya sebaik-baiknya, baik dalam hubungan dengan Allah (*hablu minallah*) maupun dengan manusia (*hablu minannas*) adalah syariah atau lengkapnya syariah Islamiyah yang dalam bahasa Indonesia disebut syariah Islam.³

Kartel adalah organisasi yang menghasilkan atau menjual barang-barang sejenis; organisasi perusahaan-perusahaan besar (negara dan sebagainya) yang memproduksi barang yang sejenis; persetujuan sekelompok perusahaan dengan maksud mengendalikan harga komoditi tertentu⁴

Undang-undang adalah ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan seperti larangan, hukuman dan sebagainya yang dibuat oleh kepala negara atau suatu badan, organisasi.⁵

Monopoli adalah berdagang sendiri, orang lain atau kongsi lain tidak boleh ikut serta; untuk seorang atau segolongan saja; hak monopoli; mempunyai hak berdagang sendiri.⁶

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.⁷

³ Amnawaty, Wati Rahmi Ria, *Hukum dan Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008), h. 7

⁴Team Pustaka Phoenix, *Op. Cit*, h. 423

⁵Team Pustaka Phoenix, *Op. Cit*, h. 942.

⁶Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal 1 huruf a

⁷*Ibid*, pasal 1 huruf f.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan-alasan untuk memilih dan menentukan judul penelitian di atas adalah :

1. Alasan objektif

- a. Persaingan para pelaku usaha di dunia bisnis tidak jarang menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat.
- b. Para pemain bisnis bekerja keras dengan mengimplementasikan pelbagai strategi inovasi untuk menguasai pasar agar produk/barang dan pelayanan jasa yang berkualitas dan lebih baik lagi, harga yang lebih kompetitif daripada harga yang ditawarkan pesaing.

2. Alasan subjektif

- a. Berdasarkan aspek yang diteliti mengenai masalah tersebut dengan tersedianya banyak literatur yang menunjang, maka dimungkinkan untuk dilakukan penelitian.
- b. Masalah kesyarifan khususnya ilmu bidang bisnis merupakan salah satu yang harus dikuasai oleh sarjana jurusan muamalah yang sesuai dengan jurusan penulis.
- c. Penelitian ini belum pernah dibahas oleh orang lain.

C. Latar Belakang

Pada saat ini persaingan antara perusahaan sudah dianggap sebagai persoalan yang umum dan merupakan suatu hubungan yang tidak dapat dielakkan, karena setiap perusahaan akan memberikan yang lebih baik, berkualitas dan terjamin terhadap produknya bagi konsumen akan tetapi dengan adanya persaingan, maka ada pihak-pihak yang akan dirugikan terutama pihak perusahaan yang

kalah bersaing. Kartel sama seperti halnya monopoli yang mempunyai posisi dominan dan kekuatan untuk menentukan harga pasar, kartel disini juga membahas mengenai bentuk pasar yang mengacu pada kerjasama antar perusahaan yang sejenis dengan menentukan ketetapan harga yang telah dibuat bersama.

Kartel adalah tipe yang paling umum dari bentuk pasar yang sekarang ini sedang merambah di Indonesia dan ada beberapa perusahaan yang pernah melakukan kartel. Salah satu kegiatan kartel yang pernah terbukti melakukan kerjasama kartel adalah di bidang operator telekomunikasi yaitu pada tahun 2009, KPPU berhasil membongkar praktik kartel dalam penetapan tarif layanan pesan pendek atau Short Message Service (SMS). Praktik kartel tersebut melibatkan nama-nama perusahaan operator seluler, seperti PT Exelcomindo Pratama, Tbk., PT Telkomsel, Tbk., PT Telkom (Persero), PT Bakrie Telecom, Tbk., PT Mobile-8 Telecom, Tbk., dan PT Smart Telecom. Praktik kartel tersebut dilakukan selama periode waktu 2004 s/d 2008 dan diperkirakan merugikan konsumen sebesar 2,83 triliun.⁸ Praktik kartel bukan hanya dalam layanan SMS semata, melainkan juga pada penetapan tarif panggilan. Selain itu belum lama ini, KPPU sudah memiliki bukti kuat untuk menyingkapkan kasus dugaan kartel antara PT. Astra Honda Motor (AHM) dan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), dalam bentuk dokumen jalinan komunikasi melalui e-mail antara direksi dua perusahaan besar tersebut. Komunikasi tersebut berisi koordinasi untuk menyesuaikan harga jual sepeda motor jenis skuter matik (skutik) di Indonesia dalam kurun waktu 2013-2015.

Adanya kerjasama tersebut menjadikan harga menjadi naik lebih tajam, dan tidak adanya persaingan perusahaan satu dengan perusahaan lainnya, dan ini menimbulkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan

⁸<https://nasional.kompas.com/read/2008/06/18/20280013/kartel.sms.ru.gikankonsumen.rp2827.triliun> (25 April 2018)

yang telah bekerjasama dan akan mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi konsumen. Hal ini tidak sesuai dengan aturan hukum dan norma jual beli atau perdagangan yang terdapat dalam Al-Quran, As-Sunnah, sebagaimana firman Allah dalam surat Mutaffifin ayat 2-7 :

الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٦) كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفَجَارِ لَفِي سِجِّينٍ (٧) ^٩

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijjin.”¹⁰

Dengan demikian persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting dalam agama Islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia, oleh karena itu, syariah muamalah diturunkan oleh Allah dalam bentuk global dengan mengemukakan berbagai hukum dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam bermuamalah sesama manusia.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), h. 587-588

¹⁰ *Ibid*

Pasal 11 UU No. 5 tahun 1999 memuat ketentuan sebagai berikut :¹¹

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Undang-undang tersebut dikeluarkan untuk mengatasi terjadinya kartel yang bertujuan untuk mempengaruhi harga pasar, karena dengan adanya kartel maka timbulah suatu monopoli yang sangat jelas dilarang dalam undang-undang perdagangan.

Kartel berperan meminimalisasi perang harga atau bersaing dalam harga karena dari beberapa perusahaan telah menjalin kerjasama, namun dampak dari adanya kerjasama ini atau kartel dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dan juga berdampak pada kerugian konsumen.

Pengambilan keputusan mengenai harga tergantung pada kesepakatan harga yang telah ditentukan bersama oleh perusahaan yang terkait, dan kebijakan diambil adalah memaksimalkan keuntungan, oleh karena itu masalahnya menjadi masalah monopoli.

Monopoli biasanya mengacu pada penguasaan terhadap penawaran dan harga. Monopoli dapat menentukan harga pasar untuk jenis barang produksinya. Karena ia produsen tunggal untuk jenis barang tertentu maka muncul motif untuk memaksimalkan keuntungan, produsen akan menetapkan harga barang menurut kehendaknya dan menentukan agar penjualan suatu jumlah

¹¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal 11.

barang dengan harga tertentu untuk menghasilkan keuntungan bersih yang maksimum.

Ekonomi Islam menetapkan adanya monopoli dengan cara melihat perilaku individu, produsen dan penjual, ketika barang yang ditahan yang membahayakan kepentingan umum dengan tujuan untuk menaikkan harga, maka hal tersebut adalah monopoli yang tidak diperbolehkan oleh Islam, sama saja apakah perilaku tersebut timbul dari sektor khusus atau sektor umum, pemilik modal, atau serikat pekerja, sama juga monopoli berbeda-beda sesuai perbedaan tingkat monopoli.

Syirkah dalam fiqh muamalah merupakan ikatan kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad syirkah yang disepakati oleh kedua belah pihak, maka semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati bersama.

Syirkah dan kartel mempunyai esensi yang sama yaitu menjalin kerja sama. Sebagian ulama terhadap syirkah ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak tergantung dari tujuan kerjasama tersebut dan sebaliknya untuk kartel sendiri undang-undang melarang karena ada unsur monopoli.

Sebagaimana telah dijelaskan di dalam al-Qur'an bahwa setiap pedagang atau pengusaha muslim berkewajiban untuk mentaati seluruh aturan hukum dan norma jual beli atau perdagangan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits, diantaranya adalah bahwa setiap pedagang atau pengusaha muslim dituntut untuk senantiasa berperilaku jujur dan adil serta menghindari segala bentuk persaingan yang curang dan kotor, sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat 85 :

وَيَنْقُومَ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخُسُوا
الْأَنْفُسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ^(٨٥)

Artinya: “Dan Syu’aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.”¹³

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem kartel dalam perdagangan menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sistem kartel dalam perdagangan ?

E. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sistem kartel dalam perdagangan menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap sistem kartel dalam perdagangan.

¹² Kementerian Agama RI, *Op. Cit*, h. 231

¹³ *Ibid*

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum bisnis Islam terkait dengan pelaksanaan mengenai sistem kartel dalam perdagangan dan peraturan dalam pemberantasan kartel dalam perdagangan di Indonesia.
- b. Secara praktis penelitian ini bermanfaat untuk :
 1. Sebagai acuan para pedagang atau pengusaha dalam berbisnis dan memasuki persaingan pasar yang sehat dalam dunia perdagangan yakni persaingan yang wajar, adil, dan fair.
 2. Untuk kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi syariah dimasa yang akan datang khususnya dibidang perdagangan .

F. Metode Penelitian

Metode adalah prosedur/cara mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis.¹⁴ Sedangkan penelitian adalah suatu cara mencari dan mengungkapkan kebenaran dengan ciri objektivitas, karena di sini kebenaran yang diperoleh secara kontekstual atau deduktif saja tidak cukup, tetapi harus diuji secara empiris.¹⁵

Berdasarkan pengetahuan di atas berarti metode penelitian adalah cara untuk memperoleh pengetahuan dengan berbagai langkah sistematis dengan mengikuti prosedur yang ada untuk memperolehnya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada

¹⁴Sedarmayanti, dan Syarifudin Hayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 25

¹⁵*Ibid*, h. 27

filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.¹⁶

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori yang berhubungan dengan sistem kartel. Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan.

2. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan, membaca, menganalisis buku dan berbagai macam literatur lainnya yang ada kaitannya dengan penelitian.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu menyusun menguraikan secara sistematis tentang sistem kartel menurut UU RI No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan analisa hukum Islam mengenai sistem kartel dan kemudian melakukan analisa untuk memperoleh kesimpulan dan selanjutnya menjabarkan dalam bentuk kata-kata.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 9

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kepustakaan. Sedangkan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang dibutuhkan meliputi:

- a. Bahan primer (pokok) yaitu al-Quran, al-Hadits, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 Tentang Kartel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, jurnal, majalah atau berbagai literatur lainnya yang berkaitan khusus dengan penelitian yang akan dilakukan.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedi, dan beberapa artikel dari internet.

4. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data penulis menggunakan studi pustaka dengan cara membaca, menelaah, menyalin, mengutip serta mempelajari berbagai macam literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti baik terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.

Setelah data terkumpul kemudian dilakukan pengelolaan data dengan cara :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (buku literatur, perundang-undangan, atau dokumen).
- c. Rekontruksi data (*recontructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematisasi data (*sistematising*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁷

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisa data dilakukan dalam bentuk analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, lengkap, dan rinci menurut pembahasan yang telah ditentukan. Hal ini akan mempermudah penafsiran dan penarikan kesimpulan sebagai jawaban penelitian yang kemudian hasil analisis dan pembahasan tersebut ditulis dalam bentuk laporan penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, lengkap dan jelas.

¹⁷ Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h.131

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Kerjasama (Syirkah) dalam Hukum Islam

1. Pengertian Syirkah

Secara etimologi, syirkah berarti campuran. Syirkah yaitu : percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan. Syirkah termasuk perserikatan dagang, ikatan kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad syirkah yang disepakati oleh kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati.¹⁸

Secara terminologi, ada beberapa definisi syirkah yang dikemukakan oleh para ulama fiqh antara lain :¹⁹

a. Menurut Hanafiyah :

Syirkah adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan.

b. Menurut Malikiyah :

Syirkah adalah persetujuan untuk melakukan tasarruf bagi keduanya beserta diri mereka; yakni

¹⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.165

¹⁹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), h.

setiap orang yang berserikat memberikan persetujuan kepada teman serikatnya untuk melakukan tasarruf terhadap harta keduanya di samping masih tetapnya hak tasarruf bagi masing-masing peserta.

c. Menurut Syafi'iyah :

Syirkah menurut syara' adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama.

d. Menurut Hanabilah :

Syirkah adalah berkumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau tasarruf (pengelolaan harta).

Pada dasarnya definisi-definisi yang dikemukakan para ulama fiqh diatas hanya berbeda secara redaksional, sedangkan esensi yang terkandung di dalamnya adalah sama, yaitu ikatan kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan. Dengan adanya akad syirkah yang disepakati kedua belah pihak, semua pihak yang mengikatkan diri berhak bertindak hukum terhadap harta serikat itu, dan berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan persetujuan yang disepakati.

2. Dasar Hukum Syirkah

a. Al-quran

Dasar hukum perserikataan ini dapat dilihat dalam ketentuan Al-Quran Surat Shad ayat 24 :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّلِحَتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ
وَحَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya : Daud berkata “Sesungguhnya Dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.²⁰

Kata *khulathaa* dalam ayat di atas adalah orang yang melakukan kerjasama. Ayat ini menunjukkan kebolehan perkongsian, dan larangan untuk menzalimi mitra kongsi.²¹

Surat Al-Isra ayat 64

وَأَسْتَفْزِرُ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَأْجِلِبُ عَلَيْهِمُ بِخَيْلِكَ
وَرَجْلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدَّهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ
الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا

Artinya : “dan hanguslah siapa yang kamu sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki dan berserikatlah

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Transliterasi Per Kata dan Terjemahan Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011), h. 454

²¹ Saleh Al-Fauzan, *Loc. Ct*

dengan mereka pada harta dan anak-anak dan beri janjilah mereka”.²²

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwasanya dalam persekutuan atau perserikatan dibangun dengan prinsip perwalian (perwakilan) dan kepercayaan atau amanah, maka dalam pelaksanaannya hendaklah kedua belah pihak menjunjung tinggi kebersamaan dan menjauhi penghianataan.

b. Hadits

Kemitraan usaha telah dipraktekkan di masa Rasulullah SAW. Para sahabat terlatih dan mematuhi dalam menjalankan metode ini. Rasulullah tidak melarang bahkan menyatakan persetujuannya dan ikut menjalankan metode ini.

Di riwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad SAW, bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزَّقَّانِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا²³

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshihshi, telah menceritakan kepada kami Muhaammad bin Az Zibriqian, dari Abu Hayyan At Tamimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata ; sesungguhnya Allah berfirman : “Aku adalah pihak

²² Kementerian Agama RI, *Loc. Cit*, h. 288

²³ Abu dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats *Sunan Abu Dawud*, Indonesia, Maktabah Dahlan jus III Kitab Buyu' bab Syirkah, h. 256.

ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatnya, maka aku keluar dari keduanya.” (HR. Abu Daud dan disahkan oleh Hakim)²⁴

Maksud dari firman Allah, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat adalah bahwa Allah bersama mereka dengan menjaga, memelihara dan memberi bantuan serta barakah dalam perniagaan mereka. Maksud dari firman-Nya, selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada yang lain. Jika ia berkhianat, maka Aku keluar dari perserikatan mereka, adalah bahwa Allah akan mencabut berkah dari perniagaan mereka.

Allah SWT akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temannya, Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut. Hadits lainnya adalah dari Abdullah bin Masud ra berkata :

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِشْتَرَكْتُ
أَنَا وَعُمَارُوسَعْدُفِيهَا نَصِيبُ يَوْمٍ بَدْرٍ

Artinya: Abdullah bin Masud ra berkata: “Aku pernah berserikat dengan Amar dan Saad dalam segala apa yang kami peroleh pada peperangan Badar”. (HR. Nasai)²⁵

²⁴ Mohammad Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), h. 423.

²⁵ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terjemahan Bulugul Maram Min Adila Ahkam*, (Jakarta: Putra Amani, 1996), h. 348.

Maka hadits di atas menunjukkan kebolehan bahkan motivasi untuk melakukan perkongsian dalam perniagaan, dengan tanpa adanya pengkhianatan dari salah satu atau kedua belah pihak, karena didalamnya terdapat tolong menolong. Allah selalu menolong hamba-Nya, selama hamba-Nya menolong saudaranya.²⁶

Berdasarkan kedua hadits di atas dapat disimpulkan bahwa berserikat atau perkongsian dibolehkan dalam Islam. Dan Allah SWT akan selalu bersama kedua orang yang berkongsi dalam kepengawasannya, penjagaanya, dan bantuannya, Allah SWT akan memberikan bantuan pada kemitraan itu dan menurunkan berkah dalam perniagaan mereka. Jika keduanya atau salah satu dari keduanya telah berkhianat, maka Allah SWT akan meninggalkan mereka dengan tidak memberikan berkah dan pertolongan.

c. Al-Ijma'

Umat Islam sepakat bahwa syirkah diperbolehkan. Hanya saja, mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.²⁷

3. Rukun dan Syarat Syirkah

a. Rukun Syirkah

Rukun syirkah di perselisihkan oleh para ulama. Menurut ulama Hanafiyah rukun syirkah ada dua, yaitu *ijab* dan *kabul* sebab dan *kabul* (*akad*) yang menentukan adanya syirkah. Adapun pihak yang lain seperti dua orang atau

²⁶ Saleh Al-Fauzan, *Op.Cit*, h. 465

²⁷ Rachmad Syafe'i, *Op.Cit*, h. 186

pihak yang berakad dan harta berada di luar pembahasan *akad* seperti terdahulu dalam *akad* jual beli.²⁸

Adapun yang menjadi rukun syirkah menurut ketentuan syariat Islam adalah:²⁹

- a) *Sighat* (*lafadz* akad)
- b) Orang (pihak-pihak yang mengadakan serikat), yaitu pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam mengadakan perserikatan.
- c) Pokok pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan), yaitu dalam berserikat atau kerjasama mereka (orang-orang yang berserikat) itu menjalankan usaha dalam bidang apa yang menjadi titik sentral usaha apa yang dijalankan. Orang-orang yang berserikat harus bekerja dengan ikhlas dan jujur, artinya semua pekerjaan harus berasas pada kemaslahatan dan keuntungan terhadap syirkah.

Perjanjian pembentukan serikat atau perseroan ini *sighat* atau *lafadznya*, dalam praktiknya di Indonesia sering diadakan dalam bentuk tertulis, yaitu dicantumkan dalam akte pendirian serikat itu. Yang pada hakikatnya *sighat* tersebut berisikan perjanjian untuk mengadakan serikat.

Kalimat *akad* hendaklah mengandung arti izin untuk menjalankan barang perserikatan. Umpamanya salah seorang diantara keduanya berkata, kita berserikat pada barang ini, dan saya izinkan engkau mejalankannya

²⁸ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 179

²⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cetakan Ke-2, (Bandung: Sinar Baru Algensindp, 1996), h. 298.

dengan jalan jual beli dan lain-lainya. Jawab yang lain, Saya terima seperti apa yang engkau katakan itu.³⁰

b. Syarat Syirkah

Syarat-syarat syirkah adalah sebagai berikut:³¹

1. *Syirkah* dilaksanakan dengan modal uang tunai
2. Dua orang atau lebih berserikat, menyerahkan modal, menyampurkan antara anggota serikat dan mereka bersepakat dalam jenis dan macam perusahaannya.
3. Dua orang atau lebih mencampurkan kedua hartanya, sehingga tidak dapat dibedakan satu dari yang lainnya.
4. Keuntungan dan kerugian diatur dengan perbandingan modal harta serikat yang diberikan.

Adapun syarat-syarat orang (pihak-pihak) yang mengadakan perjanjian serikat atau kongsi itu haruslah :

1. Orang yang berakal
2. *Balligh*, dan
3. Dengan kehendak sendiri (tidak ada unsur paksaan).

Sedangkan mengenai barang modal yang disertakan dalam serikat, hendaklah berupa :

1. Barang modal yang dapat dihargai (lazimnya sering disebutkan dalam bentuk uang)
2. Modal yang disertakan oleh masing-masing persero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak di persoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu.

³⁰ *Ibid*, h. 297.

³¹ Mohammad Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1999), h. 422

Menyangkut besarnya saham-saham yang masing-masing dimiliki oleh masing-masing persero tidak ada ditentukan dalam syari'at, dengan sendirinya para persero tidak harus memiliki modal yang sama besar, dengan kata lain para persero boleh menyertakan modal tidak sama besar (jumlahnya) dengan persero yang lain.³²

4. Prinsip-Prinsip Muamalah

Prinsip dasar dalam muamalah adalah setiap muslim bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya sepanjang tidak dilarang oleh Allah berdasarkan Al-Quran dan as-Sunnah.

a. Prinsip Umum Muamalah

Dalam fiqh muamalah, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan, yaitu :³³

Pertama, kaidah fiqh (hukum Islam) yang menyatakan :



Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya

Ini mengandung arti, bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat,

³² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cetakan ke 3, (Jakarta: Sinar Grfika, 2004), h. 76.

³³ Fthurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grfika, 2013), h. 152

termasuk di dalamnya kegiatan transaksi ekonomi di Lembaga Keuangan Syariah.

Kedua, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*, جلب المصالح ودرء المفاسد) atau sering disebut *maslahah* (kemaslahatan). Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa segala bentuk muamalah yang dapat merusak atau mengganggu kehidupan masyarakat tidak dibenarkan, seperti perjudian, penjualan narkoba, prostitusi dan sebagainya.

Ketiga, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keseimbangan (*tawazun*) dalam pembangunan. Konsep keseimbangan dalam konsep syariah/muamalah Islam meliputi berbagai segi, antara lain meliputi keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual; pembangunan sektor keuangan dan sektor riil; dan pemanfaatan serta pelestarian sumber daya.

Keempat, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.

b. Prinsip Khusus Muamalah

Secara khusus prinsip dalam muamalah ini dapat dikategorikan pada dua hal, yaitu :³⁴

Pertama, hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan, beberapa prinsip muamalah yang diperintahkan antara lain: objek perniagaan harus

³⁴ *Ibid*, h. 156

halal dan thayyib, didasarkan pada kerelaan (*an-tharadhin*), dan pengelolaan yang amanah.

Kedua, hal-hal yang dilarang untuk dilakukan, hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dalam kegiatan muamalah adalah berupa kegiatan transaksi yang didasarkan pada *riba*, *gharar* atau *taghrir*, *tadlis*, *tahkir* atau *bai al-najasy*, *maysir*, dan *risywah*.

5. Macam-Macam Syirkah

Secara garis besar, syirkah dibagi menjadi dua, yaitu syirkah al-amlak (kongsi harta) dan syirkah ‘uqud (kongsi transaksi). Dalam hukum positif, syirkah amlak dianggap sebagai syirkah paksa (*ijabriyah*), sedang syirkah ‘uqud dianggap sebagai syirkah sukarela (*ikhtiyariyah*).³⁵

Menurut Wahab Zuhaili, Para ulama membagi syirkah ke dalam bentuk-bentuk dijelaskan di bawah ini.³⁶

1. Syirkah Amlak

Syirkah amlak ini adalah beberapa orang memiliki secara bersama-sama sesuatu barang, pemilik secara bersama-sama atas sesuatu barang tersebut bukan disebabkan adanya perjanjian di antara para pihak (tanpa ada akad atau perjanjian terlebih dahulu), misalnya pemilikan harta secara bersama-sama yang disebabkan/diperoleh karena pewarisan.³⁷ perkongsian ini ada dua macam

³⁵ Wahab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 422.

³⁶ *Ibid.* h. 442-513

³⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Ekonisia*, (Yogyakarta, 2003), h. 52

yaitu perkongsian sukarela dan perkongsian paksaan.

a) Perkongsian Sukarela (Ikhtiar)

Perkongsian ikhtiar adalah perkongsian yang muncul karena adanya kontrak dari dua orang yang bersekutu. Contohnya dua orang membeli atau memberi atau berwasiat tentang sesuatu dan keduanya menerima, maka jadilah pembeli, yang diberi, dan diberi wasiat bersekutu diantara keduanya, yakni perkongsian milik.

b) Perkongsian Paksaan (Ijbar)

Perkongsian ijbar adalah perkongsian yang ditetapkan kepada dua orang atau lebih yang bukan didasarkan pada perbuatan keduanya, seperti dua orang yang mewariskan sesuatu, maka yang diberi waris menjadi sekutu mereka.³⁸

Hukum dari kedua jenis perkongsian ini adalah salah seorang yang bersekutu seolah-olah sebagai orang lain dihadapan yang bersekutu lainnya. Oleh karena itu, salah seorang diantara mereka tidak boleh mengolah harta perkongsian tersebut tanpa izin dari teman sekutunya, karena keduanya tidak mempunyai wewenang untuk menentukan bagian masing-masing.³⁹

2. Syirkah 'Uqud

Syirkah uqud ini ada atau terbentuk disebabkan para pihak memang sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja sama atau bergabung dalam suatu kepentingan harta (dalam bentuk penyertaan modal)

³⁸ Rachmad Syafe'i, *Op.Cit.* h. 187.

³⁹ Rachmad Syafei, *Loc. Cit*

dan didirikanya serikat tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk harta benda.⁴⁰ Syirkah al-uqud ini diklasifikasikan keadalam bentuk syirkah: al-'inan, al-mufawadah, al'amaal, al-wujuh, dan al-mudharabah. Para ulama berbeda pendapat tentang al-mudharabah, ada yang menilai masuk dalam kategori al-musyarokah dan ada yang menilai berdiri sendiri. Penjelasan masing-masing jenis tersebut adalah sebagai berikut.⁴¹

Menurut ulama, Hanabilah yang sah hanya empat macam, yaitu : syirkah inan, syirkah abdan, syirkah mudharabah, dan syirkah wujud. Mazhab Hanafi membolehkan semua jenis syirkah di atas, apabila syarat-syarat terpenuhi. Mazhab Maliki membolehkan semua jenis syirkah, kecuali syirkah wujud. Asy Syafi'i membatalkan semua, kecuali syirkah inan dan syirkah mudharabah.⁴²

Ada yang menjadi fokus perhatian dalam pembahasan ini adalah serikat yang timbul atau lahir disebabkan karena adanya perjanjian-perjanjian atau syirkah uqud. Kalau diperhatikan pendapat para ahli hukum Islam, serikat yang dibentuk berdasar kepada perjanjian ini dapat diklasifikasikan kepada:

a. Syirkah 'inan

Adapun yang dimaksud dengan syirkah 'inan ini adalah serikat harta yang mana bentuknya adalah berupa: “Akad” (perjanjian) dari dua orang atau lebih berserikat, harta yang ditentukan oleh keduanya (para pihak) dengan maksud mendapat

⁴⁰ Heri Sudarso, *Loc. Cit*

⁴¹ Fathurahman Djamil, *Loc. Cit.*

⁴² Sayid sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, (Bandung: Al Ma' Arif, 1997), h. 176

keuntungan (tambahan), dan keuntungan itu untuk mereka yang berserikat.

Serikat 'inan pada dasarnya adalah serikat dalam bentuk penyertaan modal kerja atau usaha, dan tidak disyaratkan agar para anggota serikat atau persero harus menyetor modal yang sama besar, dan tentunya demikian halnya dalam masalah wewenang pengurusan dan keuntungan yang diperoleh.

Menyangkut pembagian keuntungan boleh saja diperjanjikan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi secara sama besar dan juga dapat berbentuk lain sesuai dengan perjanjian yang telah mereka buat. Dan jika usaha mereka ternyata mengalami kerugian, maka tanggung jawab masing-masing penyerta modal/persero disesuaikan dengan besar kecilnya modal yang disertakan oleh para persero, atau dapat juga dalam bentuk lain sebagaimana halnya dalam pembagian keuntungan. Kalau diperhatikan dalam praktiknya di Indonesia, syirkah 'inan ini dapat disamakan dengan perseroan terbatas (PT), CV, Firma, Koperasi dan bentuk-bentuk lainnya.

Mazhab Hanafi dan Hambali mengizinkan salah satu dari alternatif berikut. Pertama, keuntungan dari kedua belah pihak dibagi menurut porsi dana mereka. Kedua, keuntungan bisa dibagi secara sama tetapi kontribusi dana masing-masing pihak mungkin berbeda. Ketiga, keuntungan bisa dibagi secara tidak sama tetapi dana yang diberikan sama. Ibnu Qudamah mengantarkan, "Pilihan dalam keuntungan dibolehkan dengan adanya kerja, karena seorang dari mereka mungkin lebih ahli dalam bisnis dari yang lain dan ia mungkin lebih kuat ketimbang

yang lainnya dalam melaksanakan pekerjaannya. Karenanya, ia diizinkan untuk menuntut lebih dari bagian keuntungannya”.⁴³

Mazhab Maliki dan Syafi’i menerima jenis syirkah dengan syarat keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai dana yang ditanamkan. Dalam pandangan mereka, keuntungan jenis syirkah ini dianggap keuntungan modal.⁴⁴

b. Syirkah Mufawadhah

Syirkah mufawadhah ini dapat diartikan sebagai serikat untuk melakukan suatu negosiasi, dalam hal ini tentunya untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau urusan, yang dalam istilah sehari-hari sering digunakan istilah partner kerja atau grub. Dalam serikat ini pada dasarnya bukan dalam bentuk permodalan, tetapi lebih ditekankan kepada keahlian.

Menurut para ahli hukum Islam serikat ini mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Modal masing-masing sama
- 2) Mempunyai wewenang bertindak yang sama
- 3) Mempunyai agama yang sama
- 4) Bahwa masing-masing menjadi penjamin, dan tidak dibenarkan salah satu diantaranya memiliki wewenang yang lebih dari yang lain.⁴⁵

Jika syarat-syarat di atas terpenuhi, maka serikat dinyatakan sah, dan konsekuensinya masing-masing partner menjadi wakil partner yang lainnya dan sekaligus sebagai penjamin, dan segala perjanjian

⁴³ Ismail Nawawi, *Op. Cit*, h. 153

⁴⁴ Ismail Nawawi, *Op. Cit*. h. 154

⁴⁵ Mardani, *Op. Cit*, h. 225

yang dilakukannya dengan pihak asing (di luar partner) akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh partner yang lainnya.⁴⁶

Ulama' Hanafi dan Maliki meperbolehkan syirkah jenis ini tetapi memberikan banyak batasan baik modal, kerja, keuntungan maupun kerugian, mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sementara menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak membolehkan akad seperti ini, karena sulit untuk menetapkan prinsip kesamaan modal, kerja, dan keuntungan dalam perserikatan ini.⁴⁷

Imam Syafi'i berkata: perserikatan mufawadhah adalah bathil, kecuali pihak yang berserikat memahami makna mufawadhah dengan arti mencampurkan harta dan pekerjaan lalu membagi keuntungan, maka ini tidak mengapa. Apabila beberapa pihak mengadakan perserikatan mufawadhah dan mempersyaratkan bahwa makna mufawadhaah adalah seperti di atas, maka perserikatannya sah. Akan tetapi bila yang mereka maksudkan dengan mufawadhah adalah pihak yang berserikat dalam segala hal yang mereka dapatkan melalui cara apapun, baik dengan sebab harta ataupun yang lainnya, maka perserikatan tidak dapat dibenarkan.⁴⁸

c. Syirkah Wujuh

Syirkah wujuh ini berbeda dengan serikat sebagaimana telah dikemukakan di atas. Adapun yang menjadi letak perbedaannya, bahwa dalam serikat ini yang dihimpun bukan modal dalam bentuk uang atau

⁴⁶ Ismail Nawawi, *Loc. Cit*

⁴⁷ Ismail Nawawi, *Loc. Cit*

⁴⁸ Imam Syafi'i, *Mukhtasar Kitab Al Umm Fi Al Fiqh*, ahli Bahasa Imron Rosadi, Amirudin, Imam Amwaludin, Ringkasan Kitab Al Umm, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azam, 2014), h. 203

skill, akan tetapi dalam bentuk tanggung jawab, dan tidak sama sekali (keahlian pekerjaan) atau modal uang.

Para ulama memperselisihkan perserikatan seperti ini. Ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zayidiyah menyatakan hukumnya boleh, karena masing-masing pihak bertindak sebagai wakil dari pihak lain, sehingga pihak lain tersebut terikat pada transaksi yang dilakukan oleh mitra serikatnya. Akan tetapi, menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah, peserikatan ini tidak sah dan tidak diperbolehkan. Alasannya objek dalam perserikatan ini adalah modal dan kerja sedangkan dalam syirkah al-wujuh baik modal maupun kerja yang diakadkan tidak jelas.⁴⁹

d. Syirkah Abdan

Syirkah abdan adalah bentuk kerjasama untuk melakukan sesuatu yang bersifat karya. Dengan mereka melakukan karya tersebut mereka mendapatkan upah dan mereka membaginya sesuai dengan kesepakatan yang mereka lakukan, dengan demikian dapat juga dikatakan sebagai serikat untuk melakukan pemborongan. Misalnya tukang kayu, tukang batu, tukang besi, berserikat untuk melakukan pekerjaan membangun sebuah gedung.

Ulama' Hanafi, Maliki, dan Hambali membolehkan syirkah ini baik kedua orang tersebut satu profesi atau tidak. Mereka merujuk kepada bukti-bukti termasuk persetujuan terbuka dari nabi. Lagi pula hal ini disarankan kepada perakilan

⁴⁹ Ismail Nawawi, *Loc. Cit*

(*wakalah*) yang juga dibolehkan. Dalam syirkah jenis ini telah lama dipraktikkan.⁵⁰

e. Syirkah Mudharabah

Syirkah mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*sohibul mal*) sebagai penyedia modal, sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola (*mudharib*).⁵¹ Kontrak kerjasama modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam pandangan tertentu keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan bersama sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal.⁵²

Menurut Jumbuh Ulama (Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah Zahiruiyah, dan Syiah Immamiyah) tidak memasukan transaksi mudharabah sebagai salah satu bentuk perserikatan, karena mudharabah menurut mereka merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerjasama yang lain yang tidak dinamakan dengan perserikatan.⁵³

Al-Mudharabah diambil dari kata *adh-dharabu fil ardhi*, yang artinya melakukan perjalanan dimuka bumi untuk melakukan perniagaan. Allah berfirman Qs. Al-Muzammil ayat 20 :

وَأَخْرَوْا نَيْصِرِيُونِ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

⁵⁰ Ismail Nawawi, *Loc. Cit*

⁵¹ Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, cetakan kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 103

⁵² *Ibid*

⁵³ Daeng Naja, *Akad Bank Syariah*, Cetakan ke 1, (Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2011), h. 52

Artinya : dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.⁵⁴

Maksudnya dalam mencari rizki Allah dengan perniagaan dan usaha-usaha lainnya. Definisi mudharabah dalam syara' adalah menyerahkan sejumlah harta (uang dan sebagainya) tertentu kepada orang yang menggunakannya untuk berharga, lalu memberikan sebagian laba kepadanya.⁵⁵

Kerjasama semacam ini adalah salah satu bentuk usaha yang dibolehkan secara ijma'. Bentuk usaha ini ada pada masa Nabi Muhammad SAW, dan beliau mengakuinya. Kebolehan ini juga diriwayatkan oleh Umar r.a, Utsman r.a, Ali r.a, Ibnu Mas'ud r.a dan yang lainnya, serta tidak diketahui ada seorang sahabat yang berbeda pendapat dengan mereka.

Kebijaksanaan Allah SWT, menuntut dibolehkannya kongsi mudharabah ini, karena orang-orang membutuhkannya. Juga karena uang tidak dapat berkembang kecuali dengan diinvestasikan atau diniagakan. Menurut pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, mudharabah adalah kerja sama antara pemilik modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁵⁶

Al-'Allamah Ibu Qayyimah berkata, Mudharib (pihak pekerja) adalah orang yang dipercayai, orang yang diupah, wakil dari mitra kongsi bagi pemilik modal. Ia sebagai orang yang dipercayai ketika

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Loc. Cit*, h. 575

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cetakan 9, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 135

⁵⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, cetakan ke-2, (Jakarta: kencana, 2013), h. 196

memegang harta tersebut, ia sebagai orang yang diupah dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk mengembangkan harta tersebut, dan ia sebagai mitra kongsi ketika ada laba dari harta yang dikembangkan tersebut. Dan untuk sahnya mudharabah ini disyaratkan agar bagian pekerjaan ditentukan, karena ia berhak menerima bagian dari laba berdasarkan kesepakatan.

Para ulama sepakat bahwa pekerja harus mensyaratkan kepada pemilik modal bahwa ia mendapatkan sepertiga atau setengah dari laba, atau berdasarkan kesepakatan keduanya setelah laba tersebut diketahui bagian-bagiannya. Seandainya ditentukan untuknya semua laba, sejumlah dirham yang telah diketahui sebelumnya atau bagian yang tidak diketahui maka kongsi ini tidak sah.

Penentuan jumlah bagian untuk pekerja dari laba yang dihasilkan ada di tangan kedua belah pihak. Seandainya pemilik modal berkata kepada si pekerja, berniagalah dengan uang ini dan keuntungannya kita bagi bersama, maka setiap pihak mendapat setengah dari laba. Karena pemilik modal menisbahkan kepada dua belah pihak dengan ketetapan yang sama, tanpa ada jumlah yang lebih bagi salah satu pihak. Maka, ini menurut adanya kesamaan bagi masing-masing pihak. Seperti jika ia berkata kepada seseorang, rumah ini adalah milik kita berdua, maka masing-masing mereka mempunyai setengah rumah tersebut. Jika pemilik modal berkata kepada pekerja, berniagalah dengan harta ini dan bagian saya adalah tiga perempat ($\frac{3}{4}$) atau sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari labanya, atau berniagalah dengannya, dan untukmu tiga perempat ($\frac{3}{4}$) atau sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari labanya maka akad mudharabah tersebut sah dengan semua ini. Karena dengan diketahuinya bagian tersebut, dan

sisanya untuk pihak lain, karena labanya adalah untuk mereka berdua.

Berdasarkan akad, mudharabah terdiri atas dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelolaan uang, laba itu dibagi dua dengan presentase yang telah disepakati. Karena bersama-sama dengan keuntungan, maka mudharabah disebut syirkah.⁵⁷

Dengan demikian jika bagian salah satu pihak ditentukan, maka sisanya untuk pihak yang lain. Seandainya mereka berselisih bagian siapa yang ditentukan, maka itu adalah bagian pekerja, baik sedikit maupun banyak. Karena ia berhak atas sebagian laba dengan kerja yang ia lakukan. Dan kerja tersebut terkadang sedikit terkadang banyak. Sehingga, terkadang ditetapkan untuk pekerja bagian yang sedikit dikarenakan mudahnya pekerjaan yang ia lakukan untuk meningkatkan harta tersebut. Dan sebaliknya, terkadang ditetapkan bagian yang banyak untuknya, karena sulitnya pekerjaan yang harus ia lakukan. Terkadang juga penetapan bagian dari laba yang dihasilkan berbeda berdasarkan kecerdasan para pekerjanya. Kita hanya memperkirakan bagian pihak pekerja berdasarkan persyaratan. Berbeda dengan pemilik modal, ia berhak terhadap sebagian laba berdasarkan hartanya bukan berdasarkan persyaratan tersebut. Agama tidak memberikan suatu keuntungan yang pasti tentang kadar keuntungan yang akan dimiliki oleh masing-masing pihak yang melakukan perjanjian mudharabah. Presentase keuntungan yang akan dibagi oleh pemilik modal dan pelaksanaan usaha bisa dibagi rata atau tidak dibagi rata. Hal ini dikembalikan kepada kesepakatan yang telah mereka buat sebelumnya. Salah satu prinsip penting yang

⁵⁷ Hendi Suhendi, *Op. Cit*, h. 141

diajarkan oleh Islam dalam lapangan muamalah ini adalah bahwa pembagian itu dipulangkan kepada kesepakatan yang penuh kerelaan serta tidak merugikan dan dirugikan oleh pihak manapun.⁵⁸

Jika akad mudharabah tersebut tidak sah, maka laba yang dihasilkan adalah untuk pemilik modal, karena laba tersebut berasal dari hartanya. Sedangkan pihak pekerja mendapatkan upah sesuai dengan kebiasaan yang ada, karena ia berhak atas sebagian dari laba dengan adanya persyaratan. Dan persyaratan tersebut tidak sah dengan tidak sahnya mudharabah.

Laba yang dihasilkan dalam mudharabah tidak boleh dibagi sebelum selesainya akad mereka, kecuali dengan keridhaan mereka berdua. Laba adalah penjaga modal, dan kemungkinan terjadinya kerugian dalam proses perniagaan tetap ada yang hanya tertutupi dengan laba. Jika laba dibagi ketika masih berlangsung mudharabah dan terjadi kerugian, maka tidak ada yang menutupi kerugian tersebut. Dengan demikian, laba adalah penjaga bagi modal dan si pekerja tidak berhak atas laba tersebut kecuali setelah sempurnanya modal.

Pekerja adalah orang yang dipercaya yang wajib bertakwa kepada Allah SWT dalam menunaikan yang wajib apa yang dipercayakan kepadanya. Dan, perkataannya diterima tentang kerusakan atau kerugian yang terjadi. Perkataannya bahwa ia membeli sesuatu untuk dirinya sendiri bukan untuk mudharabah atau sebaliknya juga diterima, karena ia dipercaya dalam hal itu.⁵⁹

⁵⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, cetakan pertama, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 16

⁵⁹ Saleh Al-Fauzan, *Op. Cit*, h. 471

6. Berakhirnya Akad Syirkah

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut ini :⁶⁰

- a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasarruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari satu orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. Syirkah berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
- d. Salah satu pihak ditaruh di bawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali, Hanafi berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

⁶⁰ Hendi Suhendi, *Loc. Cit.*, h. 133

- f. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung resiko adalah para pemilknnya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampur

B. Syirkah Kerjasama Kemitraan

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam syikah adalah prinsip kemitraan dan kerjasama antar pihak-pihak yang terkait untuk meraih kemajuan bersama. Prinsip ini dapat dikemukakan dalam ajaran Islam tentang *ta'awun* (gotong royong) dan *ukuwah* (persaudaraan).

Dalam hal ini syirkah merupakan bentuk kerja sama antar pemilik modal untuk mendirikan usaha bersama yang lebih besar, atau kerja sama antara pemilik modal yang tidak mempunyai keahlian menjalankan usaha dengan pihak penguasa yang tidak mempunyai modal atau yang memerlukan modal tambahan.

Bentuk kerjasama antar pemilik modal ini merupakan pilihan usaha yang lebih efektif untuk meningkatkan etos kerja dibandingkan dengan perburuhan. Karena masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan usaha secara optimal. Apalagi jika dibandingkan dengan sistem persaingan (kompetisi) yang cenderung mengarah kepada persaingan usaha tidak sehat.

Jika diperhatikan, seluruh sistem syirkah dalam Islam didasarkan pada sistem keadilan. Keuntungan yang dibagikan kepada pemilik modal adalah keuntungan riil, bukan harga dari fasilitas modal itu sendiri, yang lazim disebut sebagai bunga (*interest*). Bahkan sekiranya syirkah mengalami kerugian tersebut sebatas saham yang diinvestasikannya. Sistem bagi keuntungan ini tentunya

berbeda dengan sistem syirkah kapitalis. Di mana pemilik modal tidak terlibat langsung dalam tanggung jawab pengelolaan usaha. Apapun yang terjadi, pihak pemodal mendapatkan keuntungan prosentatif dari besarnya modal investasi. Sekalipun perusahaan syirkah mengalami kerugian dan bangkrut.

C. Penetapan Harga Menurut Hukum Islam

Mekanisme pasar pada dasarnya adalah pasar yang berjalan secara alami sesuai dengan fungsinya sebagai sarana tempat bertemunya penjual dan pembeli, dan terjadi interaksi antara penawaran dan permintaan dengan berbagai atribut lainnya. Secara lebih spesifik, mekanisme pasar dapat dikatakan sebagai suatu pasar yang berjalan tanpa adanya campur tangan dari pihak mana pun untuk mempengaruhi permintaan, penawaran, maupun harga di dalamnya. Salah satunya dalam penetapan harga, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya. Dengan demikian, Islam menjamin pasar di mana pembeli dan penjual bersaing satu sama lain dengan arus informasi yang berjalan lancar dalam rangka keadilan.

Sesuai dengan hadits dibawah ini mengenai penetapan harga :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ
عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ وَثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ غَلَا السَّعْرُ
عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ

قَدْ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرَ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ
الْبَاسِطُ الرَّازِقُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنَّ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي
بِمُظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ⁶¹

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami Hajjaj bekata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Qatadah dan Humaid dan Tsabit dari Anas bin Malik ia berkata, ‘pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah SAW, maka orang-orang pun berkata, ‘Wahai Rasulullah, harga-harga telah melambung tinggi, maka tetapkanlah standar harga untuk kami.” Beliau lalu bersabda: ‘Sesungguhnya Allah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan melapangkan, dan Dia yang memberi rezeki. Sungguh, aku berharap ketika berjumpa dengan Allah tidak ada seseorang yang meminta pertanggungjawaban dariku dalam hal darah dan harta”

Hadits di atas pada dasarnya menegaskan bahwa harga ditentukan oleh pasar, memberikan harga berlaku menurut alamiahnya, tanpa campur tangan dari pihak mana pun. Misalnya pedagang menjual dagangannya dengan baik dan tidak mengandung kezaliman, namun kemudian harganya naik karena banyaknya orang yang meminta barang tersebut. Namun jika berbagai faktor yang tidak alamiah terjadi di pasar, misalnya terjadi monopoli sehingga masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhannya, atau masyarakat sangat memerlukan barang tertentu, namun pedagang tidak mau menjualnya

⁶¹ Abi ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah, *Sunan at-Tirmizi al-Jami’ as-Sahih*, (Berit: Dar Al-Ma’rifah, 2002), hlm. 553.

kecuali dengan harga yang tinggi, maka diperlukan intervensi terhadap pasar.⁶²

D. Kaidah Fiqih Yang Berkenaan Dengan Kemudharatan Harus Dihilangkan

Kemudharatan harus dihilangkan *الضَّرَّاءُ يُزَالُ*

Kaidah ini menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, demi menjaga kepentingan dasar dan kemaslahatan masyarakat, hukum asal yang bila masih dilaksanakan mungkin menyebabkan kesulitan, oleh karena itu kesulitan itu dapat dihilangkan dengan ketentuan atau hukum lain. Ketentuan-ketentuan ini pada umumnya berfungsi sebagai tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadi mudharat. Batasan kemudharatan adalah suatu hal yang mengancam eksistensi manusia, yang terkait dengan panca tujuan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara kehormatan atau harta benda⁶³. Orang yang telah dinyatakan bangkrut oleh pengadilan terlarang baginya untuk menjual hartanya dalam rangka melindungi hak orang yang berpiutang. Kaidah “suatu yang menyulitkan harus dihilangkan” adalah kaidah fiqih yang memasukkan semua ketentuan dalam hukum Islam di mana menghapuskan hal-hal yang membahayakan lebih diutamakan oleh syariah seperti “larangan melakukan jual beli terhadap sesuatu yang tidak ada di sisi penjual” bila dilaksanakan secara ketat mungkin mendatangkan kesulitan kepada masyarakat. Oleh karena itu syariat membolehkan jual beli salam.

⁶²Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, (Jakarta: Yayasan al-Hamidy, 1994), hlm. 744

⁶³Muhlish Usman, *Kaidah Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 1997, h. 134



BAB III

KARTEL

A. Tinjauan Umum Tentang Kartel dalam Perundang-Undangan di Indonesia

1. Pengertian Kartel

Sebelum mengetahui pengertian dari kartel, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa, dalam pasar oligopolistik hanya ada beberapa perusahaan. Untuk mengurangi persaingan dan menaikkan laba, mereka bisa mencoba untuk berkolusi atau membuat kesepakatan harga dan tingkat output. Kolusi adalah kesepakatan perusahaan-perusahaan untuk membagi pasar atau menetapkan harga pasar agar dapat memaksimalkan laba ekonomi.

Kartel merupakan suatu organisasi resmi dari para penjual yang secara bersama membentuk harga, kuantitas, dan diferensiasi produk secara bersama-sama untuk memaksimalkan keuntungan industri tersebut.⁶⁴ Sedangkan dalam pasal 11 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dijelaskan perjanjian yang bersifat kartel sebagai berikut :⁶⁵

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha sainganya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat

⁶⁴Lincoln Arsyad, *Ekonomi Mikro*, Edisi I, h. 237

⁶⁵Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal 11

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Adapun penjabaran unsur-unsur yang ada dalam pasal 11 UU Nomor 5 tahun 1999 adalah sebagai berikut⁶⁶ :

1. Unsur Pelaku Usaha

Pelaku usaha menurut pasal 1 angka 5 setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Dalam kartel, pelaku usaha yang terlibat dalam perjanjian ini harus lebih dari dua pelaku usaha. Agar kartel sukses, kartel membutuhkan keterlibatan sebagian besar pelaku usaha pada pasar yang bersangkutan.

2. Unsur Perjanjian

Perjanjian menurut pasal 1 angka 7 adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

⁶⁶ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010, h. 16

3. Unsur Pelaku Usaha Pesaingnya

Pelaku usaha adalah pelaku usaha lain yang berada di dalam satu pasar bersangkutan. Definisi pasar bersangkutan, dapat dilihat dalam peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha nomor 3 tahun 2009, tanggal 1 Juli 2009 mengenai pedoman pasal 1 angka 10 tentang pasar bersangkutan.

4. Unsur Bermaksud Mempengaruhi Harga

Sebagaimana dirumuskan dalam pasal 11 bahwa suatu kartel dimaksudkan untuk mempengaruhi harga. Untuk mencapai tujuan tersebut anggota kartel setuju mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa.

5. Unsur Mengatur Produksi Dan Atau Pemasaran

Mengatur produksi artinya adalah menentukan jumlah produksi baik bagi kartel secara keseluruhan maupun bagi setiap anggota. Hal ini bisa lebih besar atau lebih kecil dari kapasitas produksi perusahaan atau permintaan akan barang atau jasa yang bersangkutan. Sedangkan mengatur pemasaran berarti mengatur jumlah yang akan dijual dan atau wilayah dimana para anggota menjual produksinya.

6. Unsur Barang

Barang menurut pasal 1 angka 16 adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

7. Unsur Jasa

Jasa menurut pasal 1 angka 17 adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

8. Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktek Monopoli

Praktek monopoli menurut pasal 1 angka 2 adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh suatu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Dengan kartel, maka produksi dan pemasaran atas barang dan atau jasa akan dikuasai oleh anggota kartel. Karena tujuan akhir dari kartel adalah untuk mendapatkan keuntungan yang besar bagi anggota kartel, maka hal ini akan menyebabkan kerugian bagi kepentingan umum.

9. Unsur Dapat Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur. Kartel adalah suatu kolusi atau kolaborasi dari para pelaku usaha. Oleh karena itu segala manfaat kartel hanya ditujukan untuk kepentingan para anggotanya saja, sehingga tindakan-tindakan mereka ini dilakukan secara tidak sehat dan tidak jujur. Dalam hal ini misalnya dengan mengurangi produksi atau melawan hukum atau menghambat

persaingan usaha, misalnya dengan penetapan harga atau pembagian wilayah.

Dalam undang-undang obyek perjanjian yang dilarang untuk dibuat antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain adalah sebagai berikut:⁶⁷

1. Secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (pasal 4 ayat 1);

Parameter oleh undang-undang untuk menentukan apakah pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa apabila atau 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

2. Menetapkan harga tertentu atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama (pasal 5 ayat 1), dengan pengecualian :
 - a. Perjanjian yang dibuat dalam suatu usaha patungan atau
 - b. Perjanjian yang didasarkan undang-undang yang berlaku (pasal 5 ayat (2))
3. Perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama (pasal 6)

⁶⁷ Ahmad Yani dan Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), h.24-27

4. Menetapkan harga di bawah pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (pasal 7)
5. Perjanjian yang membuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang telah diterimanya tersebut, dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat (pasal 8).
6. Perjanjian yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap suatu barang dan atau jasa tertentu, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya, yakni praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (pasal 9).

Perjanjian ini dapat bersifat vertikal dan horizontal. Perjanjian ini dilarang karena pelaku usaha meniadakan atau mengurangi persaingan dengan cara membagi wilayah pasar atau alokasi pasar. Wilayah pemasaran dapat berarti wilayah Republik Indonesia atau bagian wilayah Negara Republik Indonesia misalnya kabupaten, provinsi, atau wilayah regional lainnya. Membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar berarti membagi wilayah untuk memperoleh atau memasok barang, jasa, atau barang dan jasa, menetapkan siapa saja dapat memperoleh atau memasok barang, jasa atau barang dan jasa.

7. Perjanjian yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri (pasal 10);
8. Perjanjian untuk menolak menjual setiap barang dan atau jasa dari pelaku usaha lain, yang mengakibatkan :

- a. Kerugian atau dapat diduga menerbitkan kerugian bagi pelaku usaha lain; atau
 - b. Pembatasan bagi pelaku usaha lain dalam menjual atau membeli setiap barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan (pasal 10 ayat 2);
9. Perjanjian yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (pasal 11);
 10. Perjanjian untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat (pasal 12);
 11. Perjanjian yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan barang dan atau jasa tertentu, agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa tertentu tersebut dalam pasar yang bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (pasal 13 ayat 1);

Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian dan atau penerimaan pasokan apabila 2 atau 3 pelaku usaha atau kelompok usaha menguasai lebih dari 75% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

12. Perjanjian yang bertujuan untuk menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu, yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam suatu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat (pasal 14);

Maksud dari menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi atau yang lazim disebut dengan integrasi vertikal adalah penguasaan serangkaian proses produksi atas barang tertentu mulai dari hulu sampai hilir atau proses yang berlanjut atas suatu layanan jasa tertentu oleh pelaku usaha tertentu. Praktek integrasi vertikal meskipun dapat menghasilkan barang dan atau jasa dengan harga murah, tetapi dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat yang merusak sendi-sendi perekonomian masyarakat. Praktek seperti ini dilarang sepanjang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

13. Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada suatu tempat tertentu (pasal 15 ayat 1);

Pengertian memasok di sini termasuk menyediakan pasokan, baik barang maupun jasa, dalam kegiatan jual beli, sewa menyewa, sewa beli, dan sewa guna usaha (leasing)

14. Perjanjian yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia untuk membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok (pasal 15 ayat (2));

15. Perjanjian mengenai pemberian harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok:
 - a. Harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
 - b. Tidak ada membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok (pasal 15 ayat 3).
16. Perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (pasal 16).

Salah satu yang diatur oleh Undang-Undang Anti Monopoli diantaranya adalah dilarangnya perjanjian-perjanjian tertentu yang dianggap dapat menimbulkan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Mengenai apa yang dimaksud dengan kata “perjanjian”, tidak berbeda dengan pengertian perjanjian pada umumnya, yakni sebagaimana dimaksud dalam KUH Perdata pasal 1313.⁶⁸

Sesuatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dengan demikian sangat sulit untuk dibuktikan perjanjian lisanpun secara hukum sudah dapat dianggap sebagai suatu perjanjian yang sah dan sempurna hal tersebut dipertegas lagi dalam pasal 1 huruf g dari Undang-Undang Anti Monopoli yang menyebutkan bahwa:

⁶⁸ Soesilo, Pramuji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Wipress, 2007), h. 296

perjanjian adalah suatu perbuatan dari satu orang atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.⁶⁹

Perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang Anti Monopoli adalah perjanjian dalam bentuk sebagai berikut :

- 1) Oligopoli
- 2) Penetapan harga
- 3) Pembagian wilayah
- 4) Pemboikotan
- 5) Kartel
- 6) Trust
- 7) Oligopsoni
- 8) Integritas vertikal
- 9) Perjanjian tertutup
- 10) Perjanjian dengan pihak luar negeri

Meskipun di atas dikatakan, bahwa perjanjian mengikat pada pihak yang membuatnya laksana undang-undang, namun tidak semua perjanjian yang telah dibuat sah demi hukum. Ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan, dipenuhinya empat syarat untuk sahnya perjanjian :

- 1) Adanya kesepakatan bebas dari pihak yang berjanji
- 2) Adanya kecakapan untuk bertindak dari para pihak yang berjanji
- 3) Adanya suatu obyek yang diperjanjikan
- 4) Bahwa perjanjian tersebut adalah sesuatu yang diperkenankan, baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk kebiasaan dan kepatuhan hukum, serta kesusilaan dalam ketertiban dalam ketertiban umum yang

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 huruf g

berlaku pada suatu saat tertentu pada waktu mana perjanjian tersebut dibuat dan dilaksanakan.

Dua persyaratan (pertama dan kedua) sebagaimana tersebut di atas, dalam ilmu hukum disebut dengan syarat subyektif, karena kedua hal tersebut berhubungan langsung dengan subyek hukum yang melakukan perbuatan hukum perjanjian tersebut. Terhadap pelanggaran atas syarat subyektif ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kemungkinan untuk meminta pembatalan dan perjanjian yang telah dibuatnya. Di dalam hal pembatalan tidak diminta, maka perjanjian demi hukum tetap mengikat para pihak pembuatnya.

Selanjutnya dua persyaratan terakhir ketiga dan keempat lebih terkait dengan obyek dari perjanjian tersebut, yang didalam ilmu hukum lebih dikenal dengan syarat obyektif. Syarat obyektif ini, menurut ketentuan pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika dilanggar akan demi hukum membatalkan perjanjian yang dibuat, dengan pengertian bahwa perjanjian tersebut tidak pernah ada sejak semula.⁷⁰

Dengan demikian sangat jelas bahwa larangan yang diberikan undang-undang merupakan larangan atas objek perjanjian, sehingga setiap perjanjian yang dilakukan oleh subyek hukum pelaku usaha yang memuat ketentuan-ketentuan, yang dilarang adalah batal demi hukum, dan tidak memiliki kekuatan mengikat sama sekali bagi para pihak yang berjanji.

Adapun persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi, dan atau pemasaran barang, dan atau

⁷⁰ Ahmad Yani dan Gunawan, *Op.Cit*, h. 23

jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat pesaing usaha.⁷¹

Dapat kita ketahui, bahwa pada dasarnya ada empat hal penting, yang dapat kita kemukakan tentang praktek monopoli, dan persaingan usaha tidak sehat yaitu:⁷²

- 1) Adanya pemusatan kekuatan ekonomi;
- 2) Pemusatan kekuatan tersebut berada pada satu atau lebih pelaku usaha ekonomi;
- 3) Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut menimbulkan persaingan usaha tidak sehat; dan
- 4) Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut merugikan kepentingan umum.

Selanjutnya yang dimaksud dengan pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.⁷³

Salah satu hal yang menarik dari undang-undang ini adalah selama suatu pemusatan kekuatan ekonomi tidak menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, maka hal itu dapat dikatakan telah terjadi suatu praktek monopoli, yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang ini, meskipun monopoli itu sendiri secara nyata telah terjadi dalam bentuk penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa tertentu.

Jadi untuk mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat, yang menjurus kearah terjadinya monopoli, undang-undang melarang dilakukan tindakan-tindakan tertentu oleh para pelaku usaha. Secara garis besar tindakan-tindakan tersebut dapat digolongkan ke dalam dua

⁷¹ Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 ayat 6

⁷² Ahmad Yani dan Gunawan, *Op. Cit.*, h. 17-18

⁷³ *Ibid*, h. 18

macam kategori. *Pertama*, adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka kerja sama dengan sesama pelaku usaha ekonomi. *Kedua*, dalam bentuk tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha, dan atau kelompok pelaku usaha tersebut tanpa melibatkan pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha lainnya.

2. Jenis-Jenis Kartel

Sebelum mengetahui model-model kartel, perlu kita ketahui terlebih dahulu lahir dan dibentuknya kartel dalam industri-industri yang memiliki.⁷⁴

- a. Sedikit perusahaan
- b. Faktor penghalang
- c. Permintaan akan produk inelastik
- d. Produk-produk homogen
- e. Keuntungan rendah atau kecil
- f. Konsentrasi perusahaan-perusahaan secara geografis
- g. Tidak ada larangan-larangan hukum

Jadi kartel akan lahir dan dibentuk apabila dari perusahaan-perusahaan yang sejenis ini mau bekerja sama dan mematuhi peraturan-peraturan yang telah dibuat bersama. Perusahaan akan memperoleh manfaat yang lebih besar jika perusahaan tersebut terbentuk dan efektif, akan tetapi perusahaan itu akan rugi jika perusahaan salah satu dari anggota melanggar apa yang telah disepakati bersama.

Perilaku sebuah kartel yang terorganisir dengan ketat dapat menentukan harga dan output sebagaimana halnya sebuah monopoli. Kartel sendiri dapat bertindak

⁷⁴ Lincoln Arsyad, *Op. Cit*, h. 238

sebagai penjual tunggal yang dapat mempertahankan harga yang tinggi.⁷⁵

Ada beberapa jenis kartel⁷⁶ :

a. Kartel Harga Pokok (*prijskartel*)

Di dalam kartel harga pokok anggota-anggota menciptakan peraturan di antara mereka untuk perhitungan kalkulasi harga pokok dan besarnya laba. Pada kartel jenis ini ditetapkan harga-harga penjualan bagi para anggota kartel. Benih dari persaingan kerap kali juga datang dari perhitungan laba yang akan diperoleh suatu badan usaha. Dengan menyeragamkan laba, maka persaingan di antara mereka dapat dihindarkan.

b. Kartel Harga

Dalam kartel ini ditetapkan harga minimum untuk penjualan barang-barang yang mereka produksi atau perdagangkan. Setiap anggota tidak diperkenankan untuk menjual barang-barangnya dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah ditetapkan itu. Pada dasarnya anggota-anggota itu dibolehkan untuk menjual di atas harga yang akan ditetapkan, akan tetapi atas tanggung jawab sendiri.

c. Kartel Kondisi atau Syarat

Dalam kartel ini memerlukan penetapan di dalam syarat penjualan, misalnya kartel juga menetapkan standar kualitas barang yang dihasilkan atau dijual, menetapkan syarat-syarat pengiriman, apakah ditetapkan loco gudang, FOB,

⁷⁵ *Ibid*, h. 239

⁷⁶ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 30

C&F, CIF, pembungkusannya, dan syarat-syarat pengiriman lainnya. Apa yang dikehendaki adalah keseragaman di antara para anggota yang tergabung di bawah kartel. Keseragaman itu perlu di dalam kebijaksanaan harga, sehingga tidak akan terjadi persaingan di anatara mereka.

d. Kartel Rayon

Kartel rayon atau kadang-kadang disebut juga kartel wilayah/daerah pemasaran untuk mereka. Kartel ini berkaitan dengan perjanjian antara para anggotanya untuk membagi daerah pemasarannya, misalnya atas dasar wilayah tertentu atau atas dasar jenis barang. Penetapan wilayah ini kemudian diikuti oleh penetapan harga untuk masing-masing daerah. Dalam hal itu kartel rayon pun menentukan pula suatu peraturan bahwa setiap anggota tidak diperkenankan menjual barang-barangnya di daerah lain. Dengan ini dapat dicegah persaingan di antara anggota, yang mungkin harga-harga barangnya berlainan.

e. Kartel Kontingentering

Kartel jenis ini sering disebut juga sebagai kartel produksi. Perjanjian dalam kartel jenis ini menekankan pembatasan produksi masing-masing anggota, biasanya ditetapkan atas dasar jumlah tertentu atau presentase tertentu dari total produksi. Tujuannya untuk mengatur jumlah produksi yang beredar, sehingga harga bisa dipertahankan pada tingkat tertentu. Biasanya perusahaan yang memproduksi lebih sedikit daripada jatah sisanya menurut ketentuan, akan diberi premi hadiah. Akan tetapi, sebaliknya akan didenda. Maksud dari peraturan ini adalah untuk mengadakan restriksi yang kental terhadap banyaknya persediaan, sehingga harga barang-barang yang

mereka jual dapat dinaikkan. Ambisi kartel *kontigentering* biasanya untuk mempermainkan jumlah persediaan barang, dan dengan cara itu harus berada dalam kekuasaannya.

f. Sindikat Penjualan atau Kantor Sentral Penjualan

Di dalam kartel penjualan ditentukan bahwa penjualan hasil produksi dari anggota harus melewati sebuah badan tunggal, yaitu kantor penjualan pusat, persaingan di antara mereka akan dapat dihindarkan karenanya.

g. Kartel Laba atau Pool Laba

Di dalam kartel laba, anggota kartel biasanya menentukan peraturan hubungan dengan laba yang mereka peroleh. Laba yang diperoleh anggota kartel terlebih dahulu disetorkan ke kas pusat (sistem pool) baru kemudian dibagikan kepada anggotanya berdasarkan formula yang ditetapkan bersama. Misalnya bahwa laba kotor harus disentralisasikan pada suatu kas umum kartel, kemudian laba bersih kartel dibagi-bagikan di antara anggota kartel dengan perbandingan yang tertentu pula.

3. Dampak Sistem Kartel dalam Perdagangan

Seperti halnya pasar monopoli, pasar kartel juga menimbulkan efek-efek yang negatif dalam bentuk⁷⁷:

- a. Kemungkinan adanya keuntungan yang terlalu besar (*excess profit*) yang dinikmati oleh para produsen kartel dalam jangka panjang.
- b. Kemungkinan adanya ketidak efisienan produksi.

⁷⁷ Boediono, *Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: BPFE, 1988) h. 142

- c. Kemungkinan adanya “Eksplotasi” terhadap konsumen maupun buruh.
- d. Ketegangan harga (terutama ke bawah) sering dikatakan menunjang adanya inflasi yang kronis dan ini merugikan masyarakat secara makro.

Selain itu, secara umum para ahli sepakat bahwa kartel mengakibatkan kerugian baik bagi perekonomian suatu negara maupun bagi konsumen, yaitu⁷⁸ :

- a. Kerugian bagi perekonomian suatu negara
 - 1. Dapat mengakibatkan terjadinya inefisiensi alokasi
 - 2. Dapat mengakibatkan terjadinya inefisiensi produksi
 - 3. Dapat menghambat inovasi dan penemuan teknologi baru
 - 4. Menghambat masuknya investor baru
 - 5. Dapat menyebabkan kondisi perekonomian negara yang bersangkutan tidak kondusif dan kurang kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain yang menerapkan sistem persaingan usaha sehat.
- b. Kerugian bagi konsumen
 - 1. Konsumen membayar harga suatu barang atau jasa lebih mahal daripada harga pada pasar yang kompetitif
 - 2. Barang atau jasa yang diproduksi dapat terbatas baik dari sisi jumlah dan atau mutu daripada kalau terjadi persaingan yang sehat diantara pelaku usaha.
 - 3. Terbatasnya pilihan pelaku usaha.

⁷⁸ Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010, h. 23.

Ada kebijaksanaan umum yang dilakukan pemerintah yang mungkin bisa diambil untuk mengurangi efek-efek negatif tersebut. Kebijakan tersebut menurut Prathama Rahardja, Mandala Manurung dalam teori ekonomi mikro antara lain⁷⁹:

- a. Efisiensi dan pertumbuhan ekonomi, yang mampu mengakumulasi laba super normal dalam jangka panjang. Kemampuan ini sangat dibutuhkan, agar mampu membiayai riset dan pengembangan dalam rangka mendapatkan teknologi baru, atau menyempurnakan teknologi yang sudah ada, guna meningkatkan efisiensi.
- b. Efisiensi pengadaan barang publik, karena tidak semua barang dapat disediakan secara efisien lewat pasar, dan barang tersebut umumnya dikenal sebagai barang publik, namun harus diakui juga bahwa barang publik dapat menimbulkan eksternalitas menguntungkan, yang memacu kegiatan ekonomi terutama investasi.
- c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diskriminasi harga maupun kebijaksanaan pengaturan harga dua tingkat, juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijaksanaan diskriminasi harga memungkinkan masyarakat kelas bawah, yang menganggap rekreasi merupakan barang mewah, menikmati rekreasi pada saat-saat tertentu dengan harga lebih murah. Kebijaksanaan harga dua tingkat memungkinkan dilakukannya peningkatan output melalui subsidi silang. Dengan menggunakan kedua kebijaksanaan tersebut diatas, peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan tanpa merugikan perusahaan. Perusahaan masih dapat menikmati laba super normal.

⁷⁹ Prathama Rahardja & Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Mikro*, (Jakarta: LPFEUI, 2006) h. 259-260

B. Permasalahan Dalam Kartel

1. Rintangan Masuk Perusahaan Kartel

Rintangan untuk masuk yang dihadapi oleh perusahaan baru yang ingin memasuki industri kartel sama seperti halnya oligopoli, misalkan ada perusahaan yang ada dalam suatu industri berhasil dan menaikkan harga sampai di atas biaya total rata-rata jangka panjang, sehingga diperoleh laba ekonomi. Tetapi perusahaan ini tidak tertarik ikut bergabung pada perusahaan kartel, maka perusahaan tersebut harus menghadapi rintangan-rintangan. Diantaranya ada dua jenis rintangan⁸⁰

- 1) Jenis rintangan alamiah yang pertama terjadi kalau output dimana skala efisien minimum adalah besar dibandingkan permintaan total. Dalam hal seperti ini sejumlah kecil perusahaan yang ada memperoleh laba tanpa menarik lebih banyak perusahaan untuk memasuki pasar tersebut.
- 2) Jenis rintangan alamiah yang kedua terjadi kalau terdapat suatu keuntungan biaya absolut. Ini berarti bahwa perusahaan yang sudah ada dalam industri tersebut mempunyai kurva biaya rata-rata yang cukup rendah dalam batas-batas yang sangat besar dibandingkan dengan pendapatan baru yang potensial.

Rintangan seperti ini memungkinkan perusahaan yang sudah ada dalam industri yang bersangkutan untuk menetapkan suatu harga yang walaupun perusahaan yang sudah ada dapat memperoleh laba tapi bagi pendatang baru terpaksa menghadapi kerugian selama beberapa saat sesudah kedatangannya.

⁸⁰ Richard G. Lipsey, Peter O. Steiner, Douglas D. Purvis, *Ilmu Ekonomi*, h. 135-136.

2. Keberadaan Sindikat Kartel di Indonesia

Pada tahun 2009 yang telah lalu, KPPU berhasil membongkar praktik kartel dalam penetapan tarif layanan pesan pendek atau Short Message Service (SMS). Praktik kartel tersebut melibatkan nama-nama perusahaan operator seluler, seperti PT Exelcomindo Pratama, Tbk., PT Telkomsel, Tbk., PT Telkom (Persero), PT Bakrie Telecom, Tbk., PT Mobile-8 Telecom, Tbk., dan PT Smart Telecom. Praktik kartel tersebut dilakukan selama periode waktu 2004 s/d 2008, diperkirakan merugikan konsumen sebesar 2,83 triliun.⁸¹ Praktik kartel bukan hanya dalam layanan SMS semata, melainkan juga pada penetapan tarif panggilan, dan yang lebih parah lagi masih berlangsung hingga sekarang. Praktik kartel yang dilakukan oleh para operator seluler ini pun semakin meluas, bahkan menjadi semakin nyata membatasi masuknya perusahaan operator pendatang baru.

Pada tahun 2010, KPPU berhasil membongkar modus praktik kartel dalam industri minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah. Praktik kartel berlangsung selama tahun 2008 dengan modus *price parallelism*. Dalam kasus ini, kerugian konsumen ditaksir mencapai 1,27 triliun untuk jenis minyak goreng kemasan, dan 374,3 milyar untuk jenis minyak goreng curah. Namun demikian, kasus ini kandas dalam kasasi tingkat Mahkamah Agung (MA) atas pengajuan banding oleh sebanyak 20 produsen minyak goreng lokal.⁸²

KPPU sempat pula mengungkap praktik kartel di lingkungan operator transportasi udara dalam negeri. Bentuk kartel yang dibongkar berupa praktik kartel dalam

⁸¹<https://nasional.kompas.com/read/2008/06/18/20280013/kartel.sms.rugikankonsumen.rp2827.triliun> (25 April 2018)

⁸²<http://m.republika.co.id/berita/breaking-news/ekonomi/10/05/06/114409-kartel-minyak-goreng-rugikan-konsumen-rp-1-5-triliun> (25 April 2018)

penetapan harga tiket dan tarif biaya tambahan (*surcharge*) terkait dengan avtur. Atas kasus tersebut, KPPU menjatuhkan sanksi kepada PT Sriwijaya, PT Metro Batavia, PT Lion Mentari Airlines, PT Wing Abadi Airlines, PT (Persero) Merpati Nusantara Airlines, PT Travel Express Aviation Services, dan PT Mandala Airlines. Akibat dari praktik kartel tersebut, kerugian yang dialami konsumen penerbangan mencapai 13,8 triliun selama periode 2006-2008. Sekalipun sempat mengajukan banding ke tingkat MA, tetapi pihak MA menolak gugatan tersebut.

Praktik kartel terus berlangsung dilakukan di seluruh sektor perekonomian. Belum lama ini, KPPU sudah memiliki bukti kuat untuk menyidangkan kasus dugaan kartel antara PT. Astra Honda Motor (AHM) dan PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM), dalam bentuk dokumen jalinan komunikasi melalui e-mail antara direksi dua perusahaan besar tersebut. Komunikasi tersebut berisi koordinasi untuk menyesuaikan harga jual sepeda motor jenis skuter matik (skutik) di Indonesia dalam kurun waktu 2013-2015. Bukti dokumen komunikasi itu dikuatkan dengan keterangan saksi dan ahli yang menunjukkan adanya indikasi yang mengarah pada persekongkolan dua pelaku usaha industri otomotif besar itu. AHM dan YIMM di kenal sebagai penguasa absolut pemasok kendaraan bermotor roda dua di Indonesia, yang menguasai hampir 97% pangsa pasar di Indonesia.⁸³

Sidang terhadap kasus dugaan praktik kartel antara AHM dan YIMM ini masih berlangsung di pengadilan, dan apabila kedua perusahaan tersebut terbukti melakukan praktik kartel, maka kedua perusahaan tersebut diancam sanksi administratif sebesar Rp. 25 milyar sesuai ketentuan dalam undang-undang. Dan apabila terdapat

⁸³<https://m.cnnindonesia.com/teknologi/20170106142903-384-184557/kasus-dugaan-kartel-yamaha-honda-segera-diputus-kppu> (24 April 2018)

kerugian yang diderita oleh perusahaan lain yang menjadi pesaing mereka, maka kedua perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 48 dan pidana tambahan sesuai 49 UU Nomor 5 Tahun 1999.

Disamping yang dipaparkan diatas, masih banyak lagi kasus-kasus praktik kartel yang dilakukan dalam dunia bisnis di Indonesia. Apabila di inginkan untuk menyebutkan satu persatu praktik kartel dalam industri nasional Indonesia, rasanya akan menghabiskan cukup banyak halaman.

C. Penerapan Pendekatan *Rule of Reason* Dan *Per Se Illegal* dalam UU Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Persaingan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dalam UU Persaingan Usaha. Persaingan hanya akan tercipta melalui pendekatan ekonomi pasar dimana intervensi pemerintah di dalam usaha sangat dibatasi, ini bukan berarti bahwa intervensi pemerinah terhadap pasar sama sekali ditiadakan. Bagaimanapun juga, sebagai bahan dari kerangka kebijakan ekonomi untuk memperkuat pembangunan ekonomi, negara-negara perlu memiliki kebijakan persaingan yang juga mencakup persaingan usaha.⁸⁴

UU Persaingan Usaha memberikan pengaturan mengenai “perjanjian yang dilarang” dan “kegiatan yang dilarang” yang dianggap dapat merugikan masyarakat. Untuk mengetahui suatu tindakan pelaku usaha merupakan pelanggaran terhadap UU Persaingan Usaha, maka dibuat suatu pendekatan yang menjadi acuan yaitu pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason*.

⁸⁴ Kwik Kian Gie, *Analisis Ekonomi Politik Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia & STIE IBII, 1995), h. 10

Pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason* telah lama diterapkan untuk menilai apakah suatu tindakan tertentu dari pelaku bisnis melanggar Undang-Undang Antimonopoli. Pendekatan *rule of reason* adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga otoritas persaingan usaha untuk membuat evaluasi mengenai akibat perjanjian atau kegiatan usaha tertentu, guna menentukan apakah suatu perjanjian atau kegiatan tersebut bersifat menghambat atau mendukung persaingan. Sebaliknya, *per se illegal* adalah menyatakan setiap perjanjian atau kegiatan usaha tertentu sebagai ilegal, tanpa pembuktian lebih lanjut atas dampak yang ditimbulkan dari suatu perjanjian atau kegiatan usaha tersebut. Kegiatan usaha yang dianggap sebagai *per se illegal* biasanya meliputi penetapan harga secara kolusif atau produk tertentu, serta pengaturan harga jual kembali.

Pada prinsipnya terdapat dua syarat dalam melakukan *per se illegal*, yakni *pertama*, harus ditujukan lebih kepada “pelaku bisnis” dari pada situasi pasar, karena keputusan melawan hukum dijatuhkan tanpa disertai pemeriksaan lebih lanjut, misalnya, mengenai akibat dari hal-hal yang melingkupinya. Metode seperti ini dianggap *fair*, jika perbuatan ilegal tersebut merupakan “tindakan sengaja” oleh perusahaan, yang seharusnya dapat dihindarinya. *Kedua*, adanya identifikasi secara tepat atau mudah menguasai jenis praktek atau batasan perilaku yang terlarang. Dengan perkataan lain, penilaian atas tindakan dari pelaku usaha, baik di pasar maupun dalam proses pengadilan harus dapat ditentukan dengan mudah. Keunggulan dari pendekatan ini adalah administrasi yang cepat.⁸⁵ Pendekatan *per se illegal* biasanya dipergunakan dalam ketentuan atau pasal-pasal yang menggunakan istilah “dilarang”, tanpa anak kalimat “patut

⁸⁵ Andi Fahmi, *et.al. Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks & Kontek*, (Jakarta: GTZ GmbH, 2009), hlm. 81

diduga...” atau “yang dapat mengakibatkan ...”. oleh karenanya dapat dikatakan bahwa pemeriksaan mengenai perjanjian anantara pelaku usaha menggunakan *per se illegal*.

Pembenaran substantif dalam *per se illegal* harus didasarkan pada fakta atau asumsi, bahwa perilaku tersebut dilarang karena dapat mengakibatkan kerugian bagi pesaing lainnya dan atau konsumen. Hal tersebut dapat dijadikan pegadilan sebagai alasan pembenar dalam pengambil keputusan. Oleh karena itu, terdapat dua hal penting yang harus dilakukan oleh pengadilan. Pertama, adanya dampak merugikan yang signifikan dari perilaku tersebut, dan kedua, kerugian tersebut harus tergantung pada kegiatan yang dilarang.⁸⁶

Pendekatan *rule of reason* lebih berorientasi kepada prinsip efisiensi, yakni dengan memperhitungkan akibat negatif (kerugian) dan positif (keuntungan ekonomi) dari tindakan tertentu terhadap proses persaingan. Penerapan *rule of reason* anantara lain dilihat dari bunyi ketentuan dalam undang-undang persaingan usaha yang mencantumkan kata “dapat mengakibatkan”. Dalam *rule of reason*, pengadilan dimungkinkan untuk melakukan interpretasi terhadap undang-undang. Keunggulan pendekatan sistem ini adalah menggunakan analisis ekonomi untuk mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti yaitu apakah suatu tindakan pelaku usaha memiliki implikasi kepada persaingan atau tidak. Sedangkan kelemahannya adalah pertama, *rule of reason* yang digunakan oleh para hakim mensyaratkan pengetahuan tentang teori ekonomi dan sejumlah data ekonomi yang kompleks, dimana mereka belum tentu memiliki kemampuan yang cukup untuk memahami, guna dapat menghasilkan keputusan yang rasional.

⁸⁶ Carl Kaysen dan Donald F. Turner, *Anti-Trust Policy and Economic and Legal Analysis*, (Cambridge: Harvad Universty Press, 1971), h. 142

Di samping itu, tidak mudah untuk membuktikan kekuatan pasar tergugat, mengingat penggugat harus menyediakan saksi ahli di bidang ekonomi, dan bukti dokumenter yang ekstensif dari para pesaing lainnya.⁸⁷

Terdapat beberapa cara atau analisis dalam membuktikan prinsip atau konsep mana yang harus diberlakukan atau untuk memisahkan secara tegas kedua prinsip ini, antara lainnya⁸⁸ :

1. *Bright line test (per se rules)*; dengan mengevaluasi tujuan dan akibat dari tindakannya dalam suatu pasar atau proses persaingan.
2. *Dichotomy model*; cara ini menerapkan pembatasan terhadap tindakan yang dilakukan dengan batasan yang jelas antara *per se illegal* atau *rule of reason* dan hasilnya dianalisis dengan memperbandingkan alasan dan konsekuensi yang ditimbulkannya.
3. *Truncated analysis of rule of reason (quick look theory)*; pendekatan ini lebih melihat pada sisi hambatan yang sifatnya terlihat anti persaingan. Dalam hal ini pihak yang diduga melakukan pelanggaran akan diminta untuk membuktikan bahwa hambatan yang dilakukan tidaklah bersifat anti persaingan, dan bila alasan pembenaran ini diterima, maka kemudian akan dilanjutkan dengan menggunakan analisis *rule of reason*.
4. Model tradisional 6 sel; mekanisme ini untuk menentukan kasus persaingan untuk melihat dulu hubungan ekonomi antara kedua pihak, misalnya horizontal atau vertikal dan juga berdasarkan bentuk pembatasannya, misalnya hambatan dalam bentuk harga, non harga, atau boikot.

⁸⁷ Andi Fahmi, *et.al. Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks & Kontek*, (Jakarta: GTZ GmbH, 2009), h. 86-87

⁸⁸ Ningrum Natasya Sirait, *Asosiasi & Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003), h. 104-111

5. *Rule of reason* versi Hakim Old White-Brandis; dengan pendekatan konsekuensi yang menyatakan bahwa setiap hambatan harus mendapat evaluasi untuk setiap pertimbangan yang diberikan dengan melihat keseluruhan biaya sosial yang ditimbulkannya. Dengan melihat perbandingan biaya dan keuntungan, maka pengadilan dapat mengukur beralasankah tindakan yang telah dilakukan.
6. *Direc-indirec* versi Hakim Peckham; ia menetapkan suatu standar bahwa bila hambatan itu bersifat mutlak atau langsung berakibat pada proses persaingan, maka dinyatakan dengan *per se illegal*. Bila sifatnya tambahan atau tidak langsung karena dilakukan untuk kerjasama atau transaksi yang melibatkan para pihak, maka harus dinyatakan legal walaupun hambatannya bersifat tambahan (*ancillary*).
7. *Rule of reason* versi Hakim Taft; beliau menyatakan pendekatan Hakim Peckham tetapi dengan menegaskan bahwa hambatan yang bersifat tambahan harus tetap dievaluasi. Pendekatan ini mempertanyakan apakah semua hambatan memiliki hambatan terhadap fungsinya. Hakim Taft menggunakan pendekatan keduanya sekaligus tanpa membedakan formatnya yang vertikal atau horizontal.
8. *Presumptive* (kemungkinan); analisis ini berasal dari melihat deskripsi fakta berdasarkan fungsi ekonomi dan hambatan, keberadaan hambatan yang sifatnya internal atau eksternal, kedudukan para pihak yang *relative independent*, dependen yang berhubungan dengan subjek hambatan dan bila memang sifatnya mutlak, apakah ada pengecualian yang dibolehkan undang-undang.

BAB IV

ANALISIS

A. Sistem Kartel Dalam Perdagangan Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah mengatur secara spesifik dalam pasal-pasal tersendiri mengenai kartel. Suatu kartel terjadi apabila suatu kelompok perusahaan dalam suatu industri tertentu yang seharusnya bersaing satu sama lain, tetapi mereka setuju untuk melakukan koordinasi kegiatan dengan mengatur produksi, pembagian wilayah, kolusi tender dan kegiatan-kegiatan anti persaingan lainnya, sehingga mereka dapat menaikkan harga dan memperoleh keuntungan di atas harga yang kompetitif.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Apabila diteliti perumusan pasal ini, maka yang dilarang adalah perjanjian atau persekongkolan di antara para pesaing yang berisi pengaturan terhadap produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang ditujukan untuk mempengaruhi harga, yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Perjanjian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 angka 7 adalah perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk meningkatkan diri terhadap satu atau lebih usaha lain

dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Kartel merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, maka adalah wajar apabila para pelaku kartel akan berusaha agar tidak mudah untuk dideteksi oleh penegak hukum. Oleh karenanya kesepakatan-kesepakatan atau kolusi antar pelaku usaha ini jarang berbentuk tertulis agar tidak mudah untuk terdeteksi dan tidak terdapat bukti-bukti tertulis.

Kemudian jika dilihat dari syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dua persyaratan (pertama dan kedua) sebagaimana tersebut di atas, dalam ilmu hukum disebut dengan syarat subyektif, karena kedua hal tersebut berhubungan langsung dengan subyek hukum yang melakukan perbuatan hukum perjanjian tersebut. Terhadap pelanggaran atas syarat subyektif ini, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kemungkinan untuk meminta pembatalan dan perjanjian yang telah dibuatnya. Di dalam hal pembatalan tidak diminta, maka perjanjian demi hukum tetap mengikat para pihak pembuatnya.

Selanjutnya dua persyaratan terakhir ketiga dan keempat lebih terkait dengan obyek dari perjanjian tersebut, yang di dalam ilmu hukum lebih dikenal dengan syarat obyektif. Syarat obyektif ini, menurut ketentuan pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika dilanggar akan demi hukum membatalkan perjanjian yang dibuat, dengan pengertian bahwa perjanjian tersebut tidak pernah ada sejak semula.⁸⁹

Dengan demikian sangat jelas bahwa larangan yang diberikan undang-undang merupakan larangan atas objek perjanjian, sehingga setiap perjanjian yang dilakukan oleh subyek hukum pelaku usaha yang memuat ketentuan-ketentuan, yang dilarang adalah batal demi

⁸⁹ Ahmad Yani dan Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, h. 23

hukum, dan tidak memiliki kekuatan mengikat sama sekali bagi para pihak yang berjanji.

Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, subjek hukum di dalam perjanjian-perjanjian yang dilarang yang dalam hal ini ialah kartel adalah “pelaku usaha”. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan yang dimaksudkan dengan “pelaku usaha” adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.⁹⁰

Berdasarkan perumusan yang diberikan Pasal 1 angka 5 tersebut, subjek hukum di dalam kartel bisa berupa orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau bukan berbadan hukum, baik milik swasta maupun milik negara Republik Indonesia. Dengan kata lain, badan usaha asing tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasalnya hanya badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia yang dapat dijerat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Kartel yang dirumuskan secara *rule of reason* oleh pembentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat ditafsirkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan dan pembuktian adanya pelanggaran terhadap ketentuan ini, harus diperiksa alasan-alasan pelaku usaha dan terlebih dahulu dibuktikan telah terjadi praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dengan kata lain, dalam

⁹⁰ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2008), h. 38

memeriksa dugaan adanya kartel akan dilihat alasan-alasan dari para pelaku usaha yang melakukan perbuatan kartel tersebut dan akibat dari perjanjian tersebut terhadap persaingan usaha. Dengan demikian, maka sangat diperlukan adanya pengkajian yang mendalam mengenai alasan kesepakatan para pelaku usaha dimaksud dibandingkan dengan kerugian ataupun hal-hal negatif kartel bagi persaingan usaha.

Pendekatan *rule of reason* yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang dalam pasal 11 mengenai kartel juga menyulitkan KPPU dalam melakukan pembuktian terhadap praktek kartel karena biasanya pelaku usaha yang melakukan praktek kartel terselubung dan bersembunyi dalam nama asosiasi-asosiasi atau organisasi tertentu.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), asosiasi adalah persatuan antara rekan usaha; persekutuan dagang, atau perkumpulan orang yang mempunyai kepentingan bersama. Asosiasi merupakan jembatan yang menyatukan pemerintah dan pelaku usaha, dengan adanya asosiasi dapat memudahkan masing-masing pihak. Pemerintah dapat dengan mudah menemukan dan mengontrol para pelaku usaha dengan adanya asosiasi, para pelaku usaha pun dapat menyampaikan kehendak mereka secara berkelompok dengan adanya asosiasi.

Namun, fungsi dan tujuan awal dari asosiasi kemudian disalahgunakan para pelaku usaha. Terkait dengan praktek kartel, mereka menggunakan kedok asosiasi untuk bersembunyi atas praktek kartel yang mereka lakukan. Terbentuknya organisasi atau asosiasi oleh kalangan pengusaha dapat menjadi cikal bakal terbentuknya kartel, saat ini hampir semua lini usaha di Indonesia melakukan praktek terlarang ini. Terutama yang dinaungi organisasi atau asosiasi namun bukan berarti kita menyalahkan

terbentuknya suatu organisasi, tetapi dibentuknya asosiasi itu indikasinya merupakan cikal bakal daripada kartel.

Dengan demikian asosiasi sangat rawan untuk menjadi wadah yang tepat bagi mereka untuk dapat melakukan praktek kartel tanpa perlu khawatir terhadap hukum yang akan menjerat mereka.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Kartel Dalam Perdagangan

Kartel merupakan perjanjian kerjasama oleh pelaku usaha yang satu dengan pelaku usaha sainganya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Praktek kartel bertujuan agar harga produk dipasar tidak jatuh dan harga produk dapat memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pelaku usaha, pelaku usaha biasanya membuat perjanjian di antara mereka untuk mengatur mengenai jumlah produksi sehingga jumlah produksi mereka di pasar tidak berlebih, dan tujuannya agar tidak membuat harga produk mereka di pasar menjadi lebih murah dan dapat mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengurangi produk mereka secara signifikan di pasar, sehingga menyebabkan pasar mengalami kelangkaan, yang mengakibatkan konsumen harus mengeluarkan biaya yang lebih untuk dapat membeli produk pelaku usaha tersebut di pasar, atau dapat dikatakan tujuan utama dari praktek kartel adalah untuk memperoleh sebanyak mungkin surplus konsumen ke produsen.

Kartel dapat terjadi dalam beberapa bentuk. Sebagai contoh, para pemasok mengatur agen penjual tunggal yang membeli semua output mereka dengan harga yang disetujui, dan mengadakan pengaturan dalam memasarkan produk tersebut secara terkoordinasi. Bentuk lain pemasok

melakukan perjanjian dengan menentukan harga jual yang sama terhadap produk mereka, sehingga menghilangkan persaingan harga.

Untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan dari praktek kartel dalam perdagangan dari perspektif hukum Islam, diperhatikan norma dan etika perdagangan yang ditetapkan syara' dalam bermuamalah. Berdasarkan norma dan etika yang ada, akses yang ditimbulkan dari usaha tersebut jelas bertentangan, karena Islam lebih menekankan kejujuran dan keadilan dalam bermuamalah. Syirkah dan kartel mempunyai esensi yang sama yaitu menjalin kerja sama. Sebagian ulama terhadap syirkah ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak tergantung dari tujuan kerja sama tersebut dan sebaliknya untuk kartel sendiri undang-undang melarang karena ada unsur monopoli, karena dalam melakukan syirkah itu harus sesuai dengan prinsip muamalah yaitu yang salah satunya yaitu harus bernilai secara syar'i bukan secara subjektif atau secara perseorangan yang hanya menguntungkan untuk sebagian pihak saja.

Sebagaimana telah dijelaskan didalam al-Qur'an bahwa setiap pedagang atau pengusaha muslim berkewajiban untuk mentaati seluruh aturan hukum dan norma jual-beli atau perdagangan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits, serta pendapat para fuqaha'. Diantaranya adalah bahwa setiap pedagang atau pengusaha muslim dituntut untuk senantiasa berperilaku jujur dan adil serta menghindari segala bentuk persaingan yang curang dan kotor, sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat 85:

وَيَقَوْمٍ أَوفُوا أَلْمِيزَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا
النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٨٥)

Artinya: “Dan Syu’aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.”⁹¹

Mengenai proses penetapan harga yang dilakukan oleh sekelompok para pengusaha yang melakukan kartel, sesuai dengan hadits dibawah ini mengenai penetapan harga :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ
عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ وَثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ غَلَا السَّعْرُ
عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ
قَدْ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ
الْبَاسِطُ الرَّازِقُ إِلَيَّ لَا زُجُوَ أَنَّ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي
بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ⁹²

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul Mutsanna berkata, telah menceritakan kepada kami Hajjaj berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Qatadah dan Humaid dan Tsabit dari Anas bin Malik ia berkata, ‘pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah SAW, maka orang-orang pun berkata, ‘Wahai Rasulullah, harga-harga telah melambung tinggi, maka tetapkanlah standar harga untuk kami.” Beliau lalu bersabda: ‘Sesungguhnya Allah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan melapangkan, dan Dia yang memberi rezeki. Sungguh, aku berharap ketika berjumpa dengan

⁹¹ Depag RI, Al-Quer'an dan Terjemahannya, hlm. 340

⁹² Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah, *Sunan at-Tirmizi al-Jami'* as-Sahih, (Berit: Dar Al-Ma'rifah, 2002), hlm. 553.

Allah tidak ada seseorang yang meminta pertanggungjawaban dariku dalam hal darah dan harta”

Hadits di atas pada dasarnya menegaskan bahwa harga ditentukan oleh pasar, memberikan harga berlaku menurut alamiahnya, tanpa campur tangan dari pihak mana pun. Misalnya pedagang menjual dagangannya dengan baik dan tidak mengandung kezaliman, namun kemudian harganya naik karena banyaknya orang yang meminta barang tersebut. Namun jika berbagai faktor yang tidak alamiah terjadi di pasar, misalnya terjadi monopoli sehingga masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhannya, atau masyarakat sangat memerlukan barang tertentu, namun pedagang tidak mau menjualnya kecuali dengan harga yang tinggi, maka diperlukan intervensi terhadap pasar.⁹³

Transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, hal ini sebagai wujud dari komitmen syariah Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. Harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkannya. Dengan demikian, Islam memjamin pasar di mana pembeli dan penjual bersaing satu sama lain dengan arus informasi yang berjalan lancar dalam rangka keadilan.

Selain itu untuk melakukan analisis ekonomi terhadap hukum kartel, hukum Islam menggunakan teori kaidah fiqih الضَّرَائِزُ sebagai “pisau analisis” yang berarti kemudharatan harus dihilangkan. Dengan demikian, *stressing pointnya* bukan pada terjadinya perjanjian, namun

⁹³Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Mutakhir*, (Jakarta: Yayasan al-Hamidy, 1994), hlm. 744.

pada dampak kenaikan harga yang tidak wajar yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang tergabung dalam kartel, karena dampak dari pada kartel itu lebih besar mudharatnya dibandingkan manfaatnya.. Hukum bisnis Islam menghendaki adanya hubungan yang proporsional antara negara dengan masyarakatnya (masyarakat dan pelaku usaha). Disatu sisi, negara berkewajiban untuk memberikan “pasar bebas” bagi pelaku untuk melakukan perdagangan, namun dalam satu tarikan nafas dengan itu, negara wajib menjaga dan memenuhi kebutuhan rakyatnya terutama dalam kebutuhan pokok dari tindakan-tindakan yang monopolistik.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kartel dalam perdagangan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha sainganya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Dalam perspektif hukum Islam kartel merupakan suatu praktek usaha yang bertentangan dengan fiqih muamalah, dimana dalam hal ini kartel merupakan salah satu bentuk perjanjian atau perserikatan antar pelaku usaha dalam rangka memperoleh market power dengan mengatur harga produk tertentu dengan cara membatasi ketersediaan barang di pasar yang bertujuan untuk mendistorsi pasar sehingga dapat mengakibatkan persaingan tidak sempurna.

B. Saran

1. Untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi praktek kartel atau monopoli yang ada hendaknya para penegak hukum melakukan tindakan tegas terhadap pelaku usaha tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga peraturan atau undang-undang yang mengatur masalah monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tidak hanya sekedar

sebagai bacaan saja akan tetapi dijalankan sebagaimana mestinya.

2. Diharapkan agar dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya pasal-pasal yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan masyarakat saat ini.
3. Hendaknya para pedagang atau pelau usaha Muslim dalam bermuamalah senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang sudah diterapkan syara' sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam usaha-usaha yang merugikan masyarakat luas. Seperti kartel dan monopoli yang erat dengan kecurangan dan kedzaliman.



DAFTAR PUSTAKA

Abdul Khadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'ats, *Sunan Adu Daud*, Maktabah Dahlan Juz III.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta, 2013.

Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqolani, Terjemahan Bulugul Maram Min Adila Ahkam, Putra Amani, Jakarta, 1996.

Amnawaty, Wati Rahmi Ria, *Hukum dan Hukum Islam*, Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2008

Arief Sritua, *Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1996

Ash-Shidieqy Habsy, *Falsafah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1995.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cetakan ke 3, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 1989.

Djamil Fathurahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, cetakan kedua, Jakarta, 2013.

Ghufron, A., Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta, PT Grafindo Persada, 2002.

Hendi Suherdi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Imam SYafi'i, *Mukhtasar Kitab Al Umm Fi Al Fiqh*, ahli Bahasa Imron Rosadi, Amirudin, Imam Amwaludin,

Ringkasan Kitab Al Umm, Jilid 2, Pustaka Azam,
Jakarta, 2014

Karim Helmi, *Fiqih Muamalah*, cetakan pertama, Raja
Grafindo Persana, Jakarta, 1997.

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, cetakan ke-2, kencana, Jakarta,
2013.

Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*, Ekonisia Kampus
Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2004

Nadapdap, Bintoro, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jakarta:
Jala Permata Aksara, 2009.

Naja Daeng , Akad Bank Syariah, Cetakan ke 1, Pustaka
Yustitia, Yogyakarta, 2011.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun
2009 tentang

Pedoman Pengecualian Penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat Terhadap Perjanjian yang Berkaitan
dengan Warabala.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun
2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 Tentang
Kartel Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Warabala
Prathama Rahardja, Mandala Manurung, *Teori Ekonomi
Mikro, Edisi Kedua*, Jakarta, Fakultas Ekonomi
Indonesia, 1999

Rachmad Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar
Grafika, Jakata, 2013.

Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam*, Sinar Grafika, Jakata, 2013.

Rifa'i Muhammad, *Fiqih Islam Lengkap*, Karya Toha Putra, Semarang, 1978.

Sayid sabiq, *Fiqih Sunnah 13*, Al Ma' Arif, Bandung, 1997.

Saliman, R., Abdul, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta, Fajar Inter Pratama, Offset, 2005.

Sedarmayanti, dan Syarifudin Hayat, *Metodologi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2002.

Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011.

Sonny Keraf, *Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah: Telaah Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, (Kanisius: Yogyakarta).

Sudarsono Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Ekonisia, Yogyakarta, 2003.

Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Phoenix, Jakarta, 2007.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

